RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2021 - 2026

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Sultan Hadiwijaya No. 4 Telp 0291-685790
DEMAK

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa atas perkenan dan hidayah-Nya maka dokumen **"Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak Tahun 2021 - 2026"** ini dapat disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak untuk melaksanakan program dan kegiatannya dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

Dokumen ini merupakan hasil diskusi, ide-ide, masukan dan analisa yang telah disepakati oleh berbagai pihak yang konsen dengan arah dan tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak dalam melaksanakan prioritas program dan kegiatannya sebagai salah satu instansi pelayanan masyarakat dibidang Bidang Informasi dan komunikasi publik, bidang aplikasi informatika, bidang statistik dan persandian. Diharapkan dokumen ini juga dapat menjadi salah satu sumber acuan dan pedoman, serta pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi untuk melaksanakan upaya-upaya pengelolaan Komunikasi dan informatika, urusan Statistik dan urusan Persandian bagi Pemerintah Kabupaten Demak secara terpadu dan berkelanjutan, baik antar wilayah maupun antar sektor.

Dengan segala kerendahan hati, kami mohon masukan dan saran untuk terus dapat meningkatkan kualitas dan arah serta tujuan pengelolaan Bidang Informasi dan komunikasi publik, bidang aplikasi informatika, bidang statistik dan persandian yang lebih baik di Kabupaten Demak. RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak Tahun 2021 - 2026 ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas pada umumnya dan untuk lebih meningkatkan kualitas serta kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak pada khususnya, sehingga pembangunan di Kabupaten Demak dapat dilaksanakan secara optimal dan terpadu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Demak.

Kami mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, khususnya anggota Tim RENSTRA Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Demak, atas segala dukungan dan partisipasinya dalam menyusun dan menyempurnakan dokumen ini.

Demak, 2021

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Demak

Dra. ENDAH CAHYA RINI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680903 199302 2 001

Daftar Isi

Halaman

KATA PENGANTAR			I
DAFTAR ISI			III
BAB I	**PENDAHULUAN**		
	1.1.	Latar Belakang	1
	1.2.	Landasan Hukum	2
	1.3.	Maksud dan Tujuan	5
	1.4.	Sistematika Penulisan	6
BAB II	**GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK**		
	2.1.	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
	2.2.	Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak	23
	2.3.	Capaian Kierja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak	36
	2.4.	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	50
BAB III	**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK**		
	3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	52
	3.2.	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih	54
	3.3.	Telaahan Renstra Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	55
	3.4.	Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak	61

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak 62

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak 68

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Berdasarkan Tugas dan Fungsi 72

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 91

BAB VIII PENUTUP 94

BAB I
PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi di masa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 tentang penyusunan Rancana Strategis Perangkat Daerah (PD) menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 58 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak maka

Dinas Komunikasi dan Informatika wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Demak. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khususnya bidang informasi dan komunikasi publik, bidang aplikasi informatika dan bidang statistik dan persandian, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan menuju perbaikan terwujudnya efisiensi dan efektivitas dengan program pendayagunaan aparatur, agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
27. Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak;

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai dasar bagi seluruh *stakeholder* urusan komunikasi dan informasi, urusan statistik dan persandian dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Demak khususnya bidang informasi dan komunikasi public, bidang aplikasi informatika dan bidang statistik dan persandian yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

Berisi gambaran struktur oraganisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

Berisi permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi tarhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Demak 2021-2026.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Berisi strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Demak 2021-2026.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Berisi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi mengenai indikator kinerja, kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB VIII Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

2. 1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak, tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informasi, statistik dan urusan persandian yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang Pengelolaan informasi dan komunikasi publik, Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah, Pengelolaan egovernment, Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah, Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah, Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup kabupaten;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang Pengelolaan informasi dan komunikasi publik, Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah, Pengelolaan e-government, Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah, Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah, Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup kabupaten;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan informasi dan komunikasi publik, Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah, Pengelolaan egovernment, Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah, Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat

Daerah, Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup kabupaten;

4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan informasi dan komunikasi publik, Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan e-government, Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah, Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah, Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup kabupaten;
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1 Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar. 2.1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

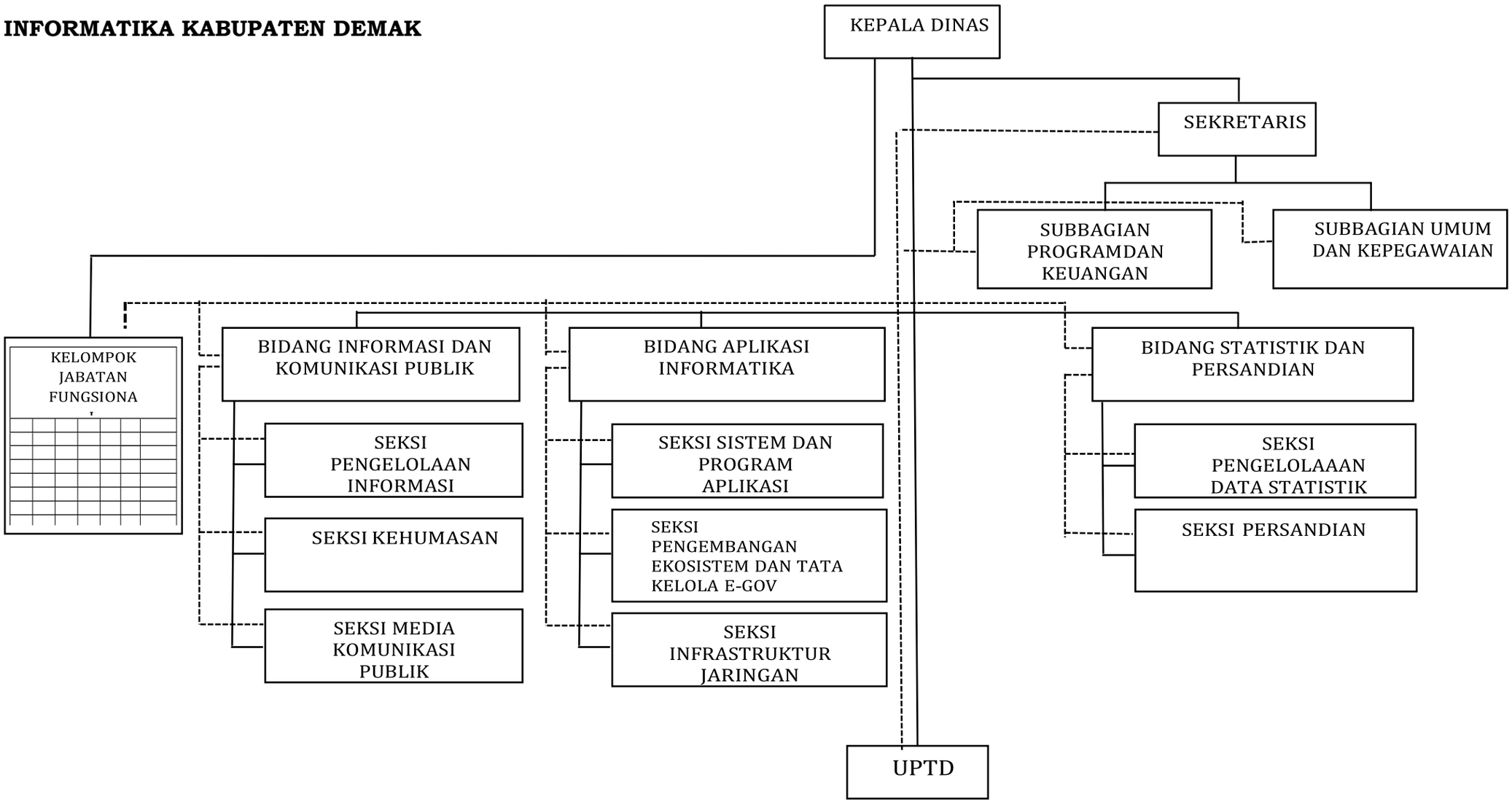

2.1.2 Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Nomor 58 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak, uraian tugas jabatan struktural Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja di bidang komunikasi dan informatika, statistik, persandian;
b. penyusunan perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, persandian;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, persandian;
d. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi di bidang komunikasi dan informatika, statistik, persandian;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, persandian;
f. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
h. Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:
i. merumuskan dan menetapkan program, rencana kerja, rencana kegiatan serta kebijakan urusan pemerintahan di

bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;

j. mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian guna pedoman pelaksanaan tugas;
k. membina, mengarahkan, dan memberi petunjuk kebijakan fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas;
l. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
m. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis urusan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
n. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan fungsi pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian secara berkala sesuai dengan bidang permasalahan agar terwujud sinkronisasi dan sinergitas dalam pelaksanaan tugas;
o. menyelenggarakan kegiatan fungsi pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;
p. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi fungsi pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian sesuai petunjuk teknis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

q. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan fungsi pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian sesuai dengan ketentuan secara berkala sebagai bahan kebijakan lebih lanjut;
r. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan kesekretariatan dan Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
s. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
t. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati;
u. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas dan fungsinya; dan
v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan program, keuangan, umum, kepegawaian, ketatausahaan, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan dan pelaporan di lingkungan Dinas. Untuk melaksanakan tugasnya Sekretariat memiliki fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang kesekretariatan; Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan, pengelolaan dan pelayanan bidang kesekretariatan;

b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, pengelolaan dan pelayanan bidang kesekretariatan;
c. pelayanan administratif Dinas; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas, untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretaris Dinas mempunyai uraian tugas:

a. merumuskan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan kesekretariatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya;
b. mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kesekretariatan;
c. memberi petunjuk, arahan serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;
d. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi;
e. merumuskan bahan kebijakan teknis kesekretariatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan diatasnya sebagai bahan kajian pimpinan;
f. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan program, keuangan, umum dan kepegawaian berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan;
g. mengoordinasikan dan menyiapkan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana anggaran antar Bidang

serta perubahannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

h. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan materi dan bahan yang terkait dengan kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian;
i. mengoordinasikan pelaksanaan anggaran Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
j. mengoordinasikan penyusunan laporan Dinas, menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan perencanaan, evaluasi, pelaporan, sistem informasi, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian berdasarkan data dan materi dari Bidang sesuai pedoman yang berlaku;
k. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keu-angan, ketatalak-sanaan, kelembagaan, kehumasan, protokoler, perpustakaan, kear-sipan, dokumentasi, perlengkapan, pengamanan kantor, kebersihan, pengelolaan aset serta fasilitasi kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu Dinas;
l. mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
m. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian fungsi-fungsi manajemen administrasi perkantoran agar terwujud pelayanan prima kesekretariatan;
n. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai kinerja bawahan secara berkala sesuai ketentuan;

p. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan selanjutnya;
q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar; dan
r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

C. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian, pengoordinasian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan program kegiatan pengelolaan informasi daerah, kehumasan dan media komunikasi publik.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi daerah, kehumasan dan media komunikasi publik; pengoordinasian dan pengendalian kegiatan pengelolaan informasi daerah, kehumasan dan media komunikasi publik;
b. pengelolaan, penyelenggaraan dan fasilitasi kegiatan pengelolaan informasi daerah, kehumasan dan media komunikasi publik;
c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi daerah, kehumasan dan media komunikasi publik; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang. Untuk melaksanakan tugas dan

fungsi Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai uraian tugas:

a. merencanakan operasional program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
b. mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
c. membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensi agar pelaksanaan tugas berjalan lancer
d. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
e. merumuskan bahan kebijakan teknis di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan Peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
f. menyelenggarakan program kegiatan di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;
g. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik berdasarkan data yang masuk dan pantauan lapangan;
h. mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja, program, kegiatan serta pemenuhan data atau bahan yang dibutuhkan dari Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
j. mengoordinasikan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;

k. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
l. melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik; dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

D. Bidang Aplikasi Informatika

Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian, pengoordinasian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan sistem dan program aplikasi, pengembangan ekosistem dan tata kelola e-government, dan infrastruktur jaringan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Aplikasi Informatika mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan sistem dan program aplikasi, pengembangan ekosistem dan tata kelola e government, dan infrastruktur jaringan.;
b. pengoordinasian dan pengendalian kegiatan sistem dan program aplikasi, pengembangan ekosistem dan tata kelola e government, dan infrastruktur jaringan;
c. pengelolaan, penyelenggaraan dan fasilitasi kegiatan sistem dan program aplikasi, pengembangan ekosistem dan tata kelola e government, dan infrastruktur jaringan;
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sistem dan program aplikasi, pengembangan ekosistem dan tata kelola e government, dan infrastruktur jaringan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Aplikasi Informatika mempunyai uraian tugas:

a. merencanakan operasional program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Bidang Aplikasi Informatika;
b. mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di Bidang Aplikasi Informatika;
c. membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensi agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
d. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
e. merumuskan bahan kebijakan teknis di Bidang Aplikasi Informatika sesuai dengan Peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
f. menyelenggarakan program kegiatan di Bidang Aplikasi Informatika berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;
g. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan Bidang Aplikasi Informatika berdasarkan data yang masuk dan pantauan lapangan;
h. mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja, program, kegiatan serta pemenuhan data atau bahan yang dibutuhkan dari Bidang Aplikasi Informatika;
i. mengoordinasikan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Aplikasi Informatika;
j. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
k. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Aplikasi Informatika; dan
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

E. Bidang Statistik dan Persandian

Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian, pengoordinasian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan data statistik dan persandian.

Fungsi Bidang Statistik dan Persandian adalah sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan data statistik dan persandian;
b. pengoordinasian dan pengendalian kegiatan pengelolaan data statistik dan persandian;
c. pengelolaan, penyelenggaraan dan fasilitasi kegiatan pengelolaan data statistik dan persandian;
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan data statistik dan persandian; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Tugas dan fungsi Kepala Bidang Statistik dan Persandian adalah :

a. merencanakan operasional program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Bidang Statistik dan Persandian;
b. mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di Bidang Statistik dan Persandian;
c. membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensi agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
d. menyelenggarakan konsultasi dengan pihak terkait;

e. merumuskan bahan kebijakan teknis di Bidang Statistik dan Persandian sesuai dengan Peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
f. menyelenggarakan program kegiatan bidang statistik dan persandian;
g. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Bidang Statistik dan Persandian berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan;
h. memberikan pertimbangan/kajian teknis kepada pimpinan;
i. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;
j. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Statistik dan Persandian; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

F. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Dinas Kominfo dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis tertentu Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Unit Pelaksana Teknis Daerah dipimpin oleh kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

G. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas, dikoordinir oleh Pejabat Fungsional senior yang ditunjuk sebagai Koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah pejabat fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. 2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak di klasifikasikan ke dalam Tabel. Komposisi pegawai berdasarkan kualfikasi pendidikan dapat dilihat pada gambar/tabel sebagai berikut :

Table 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Di Dinas Komunikasi dan Informatika semester I Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	1	-	-	-	1
2	SMA Sederajat	4	1	3	-	8
3	D3/D2	1	1	1	-	3
4	S1	5	4	2	6	17
5	S2	5	2	-	-	7
	Jumlah	16	8	6	6	36

Sumber : Sekretariat Dinkominfo, 2021

Dari jumlah pegawai sebanyak 36 orang terdiri dari 14 orang perempuan 39 % dan 22 laki-laki 61 %. ini kemudian di tentukan kompisisi pegawai berdasarkan pangkat golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi golongan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
semester I Tahun 2021

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	1	-	1
2	Golongan II	3	1	4
3	Golongan III	9	5	14
4	Golongan IV	3	2	5
	Jumlah	16	8	24

Sumber : Sekretariat Dinkominfo, 2021

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Sarana-Prasarana di Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Demak Semester I Tahun 2021

No	Nama Barang	Tahun Pengadaan	Jumlah Barang	Ket
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1982	1	SERTIFIKAT DALAM PROSES
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2001	1	EX. Kantor Perindustrian
3	electric generating set lainnya (dst)	2017	1	Rusak
4	Station Wagon	2016	2	Baik
6	Mobil Stasion	2008	1	Baik
7	Sepeda Motor	2012	1	Baik
8	Sepeda Motor	2013	4	Baik

No	Nama Barang	Tahun Pengadaan	Jumlah Barang	Ket
12	Sepeda Motor	2014	1	Baik
13	Sepeda Motor	2016	1	Baik
14	Sepeda Motor	2017	1	Baik
15	perkakas bengkel Tripod + Monopod	2019	1	,Baik
16	Global Positioning System	2011	2	Baik
17	Alat Ukuran Meteran	2013	1	Baik
18	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	2000	1	Rusak
19	Mesin Ketik Listrik	2006	1	Rusak
20	Mesin Ketik Listrik	2013	1	Rusak
21	Mesin Ketik Listrik Potable (11-13 Inci)	2019	1	Baik
22	Mesin Penghitung Uang	2013	1	Rusak
23	Lemari Besi/Metal	2003	2	Baik
24	Lemari Besi/Metal	2011	2	Baik
25	Lemari Besi/Metal	2012	3	Baik
28	Lemari Besi/Metal	2014	2	Baik
29	Lemari Besi/Metal	2015	3	Baik
32	Lemari Besi/Metal	2018	2	Baik
33	Lemari Roll opeck	2018	1	Baik
35	Lemari Kayu	1986	2	Baik
36	Lemari Kayu	2014	2	Baik
37	Lemari Kayu	2016	1	Baik
38	Rak Besi	2016	1	Baik
39	Filing Cabinet Besi	1993	1	Baik
40	Filing Cabinet Besi	2001	2	Baik
41	Filing Cabinet Besi	2008	1	Baik
42	Filing Cabinet Besi	2017	2	Baik
43	Filing Cabinet Besi	2018	3	Baik
44	Filing Cabinet Besi	2018	1	Baik
45	Lemari Kaca	2000	2	Baik
46	Lemari Kaca	2019	1	Baik
47	Lemari Kaca	2000	2	Baik
48	CCTV - Camera Control Television System	2016	1	Baik
49	CCTV - Camera Control Television System	2017	8	Baik
51	CCTV - Camera Control Television System	2018	1	Baik
52	CCTV - Camera Control Television System	2020	6	Baik
53	Hardware+software CCTV - Camera Control Television System	2020	1	Baik
56	Whiteboard besar	1983	1	Baik
57	White Board	2006	1	Baik
58	Alat Penghancur Kertas	2014	1	Baik
59	Kertas Mesin Absensi	2017	1	Baik
60	Papan Nama Instansi	2017	1	Baik
61	Papan Nama Instansi	2018	2	Baik

No	Nama Barang	Tahun Pengadaan	Jumlah Barang	Ket
62	Kamera digital	2008	2	Rusak
64	Kamera digital	2013	1	Rusak
65	Kamera digital	2014	1	baik
66	Drone	2016	1	Drone
67	Alat Kantor Lainnya	2017	4	Baik
68	Alat Kantor Lainnya Mesin Absensi	2017	1	Rusak
69	Alat Kantor Lainnya Mesin Absensi	2018	1	Baik
70	Alat Kantor Lainnya	2019	2	Baik
71	Meja Kerja Kayu	1978	1	Baik
72	Meja Kerja Kayu Bekas Pemda	1993	7	Baik
73	Meja Kerja Kayu Bekas Pemda	1994	1	Baik
74	Meja Kerja Kayu	1999	1	Baik
75	Meja Kerja Kayu	2002	1	Baik
76	Meja Kerja Kayu	2004	1	Baik
77	Meja Kerja Kayu	2007	2	Baik
79	Meja Kerja Kayu	2008	2	Baik
80	Meja Kerja Kayu	2011	2	Baik
81	Meja Kerja Kayu	2014	1	Baik
82	Meja Kerja Kayu	2014	1	Baik
83	Meja Kerja Kayu	2015	2	Baik
84	Meja Kerja Kayu	2017	2	Baik
85	Meja Kerja Kayu	2018	3	Baik
86	Meja Kerja Kayu	2018	1	Baik
87	Kursi Besi/Metal	2003	1	Baik
88	Kursi Besi/Metal	2011	8	Baik
89	Kursi Besi/Metal Kursi Baca Ruang	2012	4	Baik
90	Kursi Kayu	1993	3	Baik
91	Kursi Kayu	1999	2	Baik
92	Kursi Kayu	2003	4	Baik
93	Kursi Kayu	2006	3	Baik
94	Kursi Kayu	2007	2	Baik
95	Kursi Kayu	2008	1	Baik
96	Kursi Kayu	2011	3	Baik
97	Kursi Kayu	2013	4	Baik
98	Kursi Kayu	2013	7	Baik
99	Kursi Kayu	2013	20	Baik
100	Meja Rapat	2012	3	Baik
101	Meja Rapat	2018	2	Baik
102	Meja Rapat	2019	2	Baik
103	Meja Rapat	2019	9	Belanja Modal Interior
104	Meja Telepon	1993	1	Ex. PDE
105	Meja Telepon	2018	1	Baik
106	Meja Resepsionis	2019	1	Baik

No	Nama Barang	Tahun Pengadaan	Jumlah Barang	Ket
107	Meja Tambahan	2019	1	Baik
108	Meja Panjang	1984	1	Baik
109	Meja 1/2 Biro	1985	5	Baik
110	Kursi Rapat	2012	2	Baik
111	Kursi Rapat	2019	30	Baik
112	Kursi Putar	1990	1	Baik
113	Kursi Putar	2001	1	Baik
114	Kursi Putar	2003	2	Baik
115	Kursi Putar	2005	1	Baik
116	Kursi Putar	2011	2	Baik
117	Kursi Putar	2016	1	Baik
118	Kursi Putar	2018	3	Baik
119	Bangku Tunggu	2015	2	Baik
120	Kursi Lipat	2007	4	Baik
121	Kursi Lipat	2014	3	Baik
122	Meja Komputer	2003	4	Baik
123	Meja Komputer	2005	7	Baik
124	Meja Komputer	2006	11	Baik
125	Meja Komputer	2011	1	Baik
126	Meja Komputer	2015	10	Baik
127	Meja Komputer	2016	10	Baik
128	Meubeleur lainnya	2017	1	Baik
129	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2013	1	Baik
130	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2020	1	Baik
131	Lemari Es	2010	1	Baik
132	A.C. Sentral	2012	2	Baik
133	A.C. Sentral	2014	5	Baik
136	A.C. Sentral	2016	2	Baik
137	A.C. Window	2013	1	Baik
138	A.C. Window	2020	1	Baik
139	A.C. Split	2003	2	Baik
140	A.C. Split	2005	1	Baik
141	A.C. Split	2013	1	Baik
142	A.C. Split	2014	1	Baik
143	A.C. Split	2014	1	Baik
144	A.C. Split	2015	2	Baik
145	A.C. Split AC Ruang LPSE	2015	1	Baik
146	A.C. Split	2017	1	Baik
147	A.C. Split	2017	1	Baik
148	A.C. Split	2018	2	Baik
149	A.C. Split	2019	3	Baik
151	A.C. Split	2020	1	Baik
152	Alat Dapur	2012	1	Baik

No	Nama Barang	Tahun Pengadaan	Jumlah Barang	Ket
153	Televisi	2012	1	Baik
154	Televisi	2016	1	Baik
155	Televisi	2017	7	Baik
156	Televisi	2018	1	Baik
157	Televisi	2020	4	Baik
159	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2011	1	Baik
160	Loudspeaker	2017	1	Baik
161	Sound System	2018	1	Baik
162	Sound System	2019	4	Baik
166	Camera Video	2020	8	Baik
168	Dispenser	2018	1	Baik
169	Handy Cam	2012	1	Baik
170	Gordyin/Kray	2017	1	Baik
171	Gordyin/Kray	2018	2	Baik
172	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1993	1	Baik
173	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1995	1	Baik
174	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2002	1	Baik
175	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2018	1	Baik
176	Alat Pemadam/Portable	2012	1	Baik
177	Alat Pemadam/Portable	2017	2	Baik
178	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2017	1	Baik
179	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2017	2	Baik
180	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2017	2	Baik
181	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2016	2	Baik
182	Meja Rapat Pejabat Eselon III	2017	1	Baik
183	Meja Rapat Pejabat lainnya	2020	1	Baik
184	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2017	1	Baik
185	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2017	2	Baik
186	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2017	2	Baik
187	Kursi Kerja Pejabat lainnya	2020	7	Baik
188	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	2019	20	Baik
189	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	2020	5	Baik
190	Kursi Rapat Pejabat lainnya	2020	15	Baik
191	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	2012	2	Baik
192	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	2012	6	Baik
193	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	1989	1	Baik
194	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	2017	1	Baik
195	Buffet Kaca	2017	1	Baik
196	Audio Mixing Console kamera konvrensi	2019	1	Baik
197	Audio Amplifier	2012	1	Baik
198	Audio Amplifier Peralatan Vidcon	2020	1	Baik
199	Audio Monitor Passive	2019	2	Baik

No	Nama Barang	Tahun Pengadaan	Jumlah Barang	Ket
200	Audio Monitor Passive Komputer	2019	1	Baik
201	Audio Visual	2020	1	Baik
202	Headphone Call Taker 112	2020	2	Baik
203	softbok+lampu+lights tand+tringer+video lighting+Taffware lightening,	2020	1	Baik
204	Boya Wireles+Sony Voice+Headphone	2020	1	Baik
205	Peralatan Command Center	2020	1	Baik
206	Wireless Camera	2020	1	Baik
207	Peralatan Command center Extender mic	2020	1	Baik
208	Audio Visual	2020	3	Baik
209	Audio Visual	2020	2	Baik
210	Set Studio Light Signal	2019	1	Baik
211	Set Studio Light Signal	2020	2	Baik
208	Modulation Monitor Speaker Kabaret	2019	1	Baik
209	Microphone/Wireless MIC	2020	6	Baik
212	Microphone/Boom Stand	2020	3	Baik
213	Professional Sound System	2013	1	Baik
214	Uninterruptible Power Supply (UPS) UPS 1000 VA	2009	8	Baik
215	Microphone Cable Video Conference	2020	4	Baik
216	peralatan studio audio	2019	3	Baik
217	peralatan studio audio RODE VIDEO+TAS)	2019	1	Baik
218	peralatan studio audio DJI RONIN+ZHIYUN	2019	1	Baik
219	peralatan studio audio Peralatan Command center	2020	2	Baik
220	Rak Peralatan rak kolom ruang	2019	1	Baik
221	Rak Peralatan rak hiasan dinding	2019	2	Baik
222	Tripod Camera Video Conference	2020	2	Baik
223	Lensa Kamera Lensa Telefoto	2019	1	Baik
224	Peralatan Command Mixer PVC	2020	1	Baik
225	Layar Film/Projector	2012	2	Baik
226	Layar Film/Projector	2018	1	Baik
227	Layar Film/Projector LCD Proyektor	2020	1	Baik
228	Camera Conference	2020	2	Baik
229	Telephone (PABX)	2005	1	Baik
230	Telephone (PABX)	2007	1	Baik
231	Handy Talky (HT) Pesawat Rig	2000	1	Baik
232	Handy Talky (HT)	2006	2	Baik
233	Handy Talky (HT)	2007	8	Baik
234	Handy Talky (HT)	2014	1	Baik
235	Handy Talky (HT)	2015	1	Baik
236	Handy Talky (HT)	2020	5	Baik
237	Facsimile	2014	1	Baik
238	Facsimile	2015	1	Baik
239	Unit Tranceiver VHF Portable Radio Link	2009	2	Baik

No	Nama Barang	Tahun Pengadaan	Jumlah Barang	Ket
	VHF,Power			
240	alat-alat sandi lainnya (dst)	1999	1	Baik
241	alat-alat sandi Mesin Sandi)	2001	1	Baik
242	alat-alat sandi Criptofax Sandi	2005	1	Baik
243	Genset	2012	1	Baik
244	Genset	2015	1	Baik
245	Genset	2020	1	Baik
246	Radiation Area Monitor	2011	2	Baik
247	Radiation Area Monitor	2012	1	Baik
248	Software DAAS Cav. Tunnel	2019	1	Baik
249	Zoom Lens	2017	1	Baik
250	Internet	2020	2	Baik
251	P.C Unit	2002	2	Baik
252	P.C Unit	2006	2	Baik
253	P.C Unit	2010	6	Baik
254	P.C Unit	2011	2	Baik
255	P.C Unit Logitech Webcam	2013	6	Baik
257	P.C Unit	2013	2	Baik
258	P.C Unit	2014	2	Baik
259	P.C Unit	2014	14	Rusak
260	P.C Unit	2015	6	Baik
261	P.C Unit	2016	1	Baik
262	P.C Unit	2017	3	Baik
263	P.C Unit	2018	4	Baik
264	P.C Unit	2019	5	Baik
265	P.C Unit	2020	7	Baik
266	Lap Top	2010	1	Baik
267	Lap Top	2012	2	Baik
268	Lap Top	2013	2	Baik
269	Lap Top	2015	2	Baik
270	Lap Top	2016	4	Baik
271	Lap Top	2017	2	Baik
272	Lap Top	2017	2	Baik
273	Lap Top	2018	2	Baik
274	Lap Top	2019	1	Baik
275	Lap Top	2020	3	Baik
276	Note Book	2018	1	Baik
277	Note Book	2020	7	Baik
278	Personal Komputer PC + Sim Pemkab I	2008	2	Baik
279	Tablet Android	2012	2	Baik
280	Tablet Android	2013	3	Baik
281	software aplikasi sppd	2018	1	Baik
282	CPU Vidio Wall Controllers (Peralatan	2019	1	Baik

No	Nama Barang	Tahun Pengadaan	Jumlah Barang	Ket
	Mainframe)			
283	Server)	2017	1	Baik
284	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	2009	1	Baik
285	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	2013	1	Baik
286	Peralatan Minikomputer lainnya	2017	1	Baik
287	Monitor	2012	2	Baik
288	Monitor	2019	6	Baik
289	Monitor Digital Touchscreen	2019	1	Baik
290	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2004	1	Rusak
291	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2008	1	Rusak
292	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2010	1	Baik
293	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2012	1	Baik
294	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2013	5	Baik
295	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2014	1	Baik
296	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2015	1	Baik
297	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2017	6	Baik
298	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2018	3	Baik
299	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2019	2	Baik
300	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2020	6	Baik
301	External	2020	1	Baik
356	Keyboard (Peralatan Personal komputer	2020	1	Baik
357	Peralatan Personal Komputer lainnya	2006	2	Baik
358	Peralatan Personal Komputer lainnya	2008	1	Baik
359	Peralatan Personal Komputer lainnya	2011	1	Baik
360	UPS 1200 VA	2012	1	Baik
361	Peralatan Personal Komputer lainnya	2013	3	Baik
364	Peralatan Personal Komputer lainnya	2014	2	Baik
365	UPS Stabilizer	2014	3	Baik
366	Peralatan Personal Komputer lainnya	2014	11	Baik
372	Peralatan Personal Komputer lainnya	2015	2	Baik
373	Peralatan Personal Komputer lainnya	2015	14	Baik
375	Peralatan Personal Komputer lainnya	2015	1	Baik
376	Peralatan Personal Komputer lainnya	2016	10	Baik
381	Peralatan Personal Komputer lainnya	2017	5	Baik
382	Peralatan Personal Komputer lainnya	2017	6	Baik
383	Peralatan Personal Komputer lainnya	2017	1	Baik
384	Peralatan Personal Komputer lainnya	2017	1	Baik
385	Peralatan Personal Komputer lainnya	2017	1	Baik
386	Peralatan Personal Komputer lainnya	2017	1	Baik
387	Peralatan Personal Komputer lainnya	2017	1	Baik
388	Peralatan Personal Komputer lainnya	2017	1	Baik
389	Peralatan Personal Komputer lainnya	2019	1	Baik
390	Server	2013	1	Baik

No	Nama Barang	Tahun Pengadaan	Jumlah Barang	Ket
391	Server	2014	1	Baik
392	Server	2015	1	Baik
393	Server	2016	1	Baik
394	Server	2017	1	Baik
395	Server	2018	1	Baik
396	Server	2019	1	Baik
397	Server	2020	1	Baik
398	Server	2011	1	Baik
399	Peralatan Jaringan lainnya	2008	2	Baik
400	Peralatan Jaringan lainnya	2009	1	Baik
401	Peralatan Jaringan lainnya	2013	2	Baik
402	Peralatan Jaringan lainnya	2014	3	Baik
403	Router FO	2015	3	Baik
404	Peralatan Jaringan lainnya	2017	1	Baik
405	Jaringan Kabel FO Peralatan Jaringan lainnya	2020	1	Baik
406	Peralatan Penunjang Peralatan Jaringan lainnya	2020	1	Baik
407	Penataan Kabel Peralatan Jaringan lainnya	2020	1	Baik
408	Peralatan Jaringan lainnya	2020	1	Baik
409	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1983	1	Baik
410	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2006	1	Baik
411	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2018	1	Baik
412	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	2019	1	Baik
413	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1992	1	Baik
414	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	2006	1	Baik
415	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	2014	1	Baik
416	Raised Floor Ruang	2015	1	Baik
417	Papan BALIHO	2020	6	Baik
418	Bangunan Menara Telekomunikasi	2012	1	Baik
419	Bangunan Menara Telekomunikasi Lain-lain (dst)	2015	1	Baik
420	Bangunan Menara Telekomunikasi Lain-lain (dst)	2016	4	Baik
421	Bangunan Menara Telekomunikasi Lain-lain (dst)	2018	1	Baik
422	Pagar Permanen Pagar Gedung	2008	1	Baik
423	Instalasi Benteng Konstruksi	2019	1	Baik
424	Jaringan Sambungan	1982	1	Rusak
425	Jaringan LAN	2004	1	Rusak
426	Jaringan LAN	2006	1	Rusak
427	Jaringan WAN	2007	1	Rusak
428	Peralatan Jaringan Komputer	2008	1	Baik
429	Instalasi Penangkal Petir	2014	1	Baik

Sumber : KIB Dinkominfo, 2021

2.3.1. Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

Tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi capaian kinerja urusan Komunikasi dan Informatika, urusan statistik dan urusan persandian yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Demak Tahun 2016-2021

NO	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK / SPM*)	Target IKK*)	Target Indikator Lainnya*)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio (Realisasi/target) %				
						Pada tahun ke					Pada tahun ke					Pada tahun ke				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	2	21
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	-	n/a	-	14	14	14	41	41	14	14	14	41	41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	14
2	Cakupan layanan telekomunikasi	-	n/a	-	60	61	62	65	70	67,3	70,2	78,3	80,2	88,22	112,17	115,08	126,29	123,38	126,03	60
3	Persentase penduduk yg menggunakan HP (usia 15-59 th)	-	n/a	-	50	53	58	62	760.515	54,12	58,56	62,75	65,95	70,61	108,24	110,49	108,19	106,37	0,01	50
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	-	n/a	-	-	-	-	-	396.535	-	-	-	-	396.535	-	-	-	-	100,00	-
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	-	n/a	-	-	-	-	-	396.535	-	-	-	-	396.535	-	-	-	-	100,00	-
6	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	-	n/a	-	-	-	-	42	42	-	-	-	42	42	-	-	-	100,00	100,00	-
7	Buku "kabupaten dalam angka"	-	n/a	n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1
8	Buku "PDRB"	-	n/a	n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1

9	'Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah di Kabupaten Demak	-	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100

**) data Triwulan II*

2.3.2.Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

Pada bagian ini di jelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak. Pada Program Pelayanan administrasi perkantoran rasio antara realisasi dengan anggaran tertinggi sebesar 99%. Pogram peningkatan sarana prasarana aparatur rasio antara realisasi dan anggaran mencapai 99%. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur rasio antara realisasi dengan program mencapai 100%, karena hanya ada 1 kegiatan yang dilaksanakan untuk mengadakan studi banding. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa rasio realisasi dengan anggaran tertinggi sebesar 99,45%, Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi program ini hanya ada 2 tahun yaitu 2017 dan 2018 rasio antara realisasi dan naggran mencapai 99,3%. Program kerjasama informasi dengan mass media rasio realisasi dengan anggaran tertinggi sebesar 99,72% dicapai pada tahun 2018. Program pengembangan data/informasi/statistic daerah raiso antara realisasi dengan anggaran tertinggi 2019 mencapai 99,86%. Program pengelolaan persandian rasio antara realisasi dengan anggaran tertinggi mencapai 99,73% pada tahun 2017. Program ini hanya ada pada 2017 dan 2018.

Pada tahun 2021 dalam penyusunan program dan kegiatan mendasarkan pada Peraturan Menteri dalam Negeri tahun 90 tahun 2018. Semester I Tahun 2021 sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah.

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**758.049.800**	**885.200.000**	**1.008.503.100**	**0**	**0**	**750.609.623**	**879.321.923**	**1.007.369.416**	**0**	**0**	**99,02**	**99,34**	**99,89**	**0**	**0**	**530.350.580**	**527.460.192**
Penyediaan jasa surat menyurat	2.000.000	2.000.000	500.000	0	0	1.998.000	1.970.500	499.500	0	0	99,90	98,53	99,90	0	0		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	491.147.800	465.000.000	729.000.000	0	0	484.528.765	460.047.831	727.966.988	0	0	98,65	98,94	99,86	0	0		
Penyediaan jasa administrasi keuangan	20.943.500	19.000.000	21.600.000	0	0	20.928.700	19.000.000	21.600.000	0	0	99,93	100	100	0	0		
Penyediaan alat tulis kantor	57.256.500	72.200.000	34.053.100	0	0	57.256.500	72.193.600	34.053.100	0	0	100	99,99	100	0	0		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13.000.000	20.000.000	8.000.000	0	0	13.000.000	20.000.000	8.000.000	0	0	100	100	100	0	0		
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000	10.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	9.963.900	5.000.000	0	0	100	99,64	100	0	0		
Penyediaan peralatan rumah tangga	5.000.000	10.000.000	0	0	0	5.000.000	10.000.000	0	0	0	100	100	0	0	0		

Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.000.000	3.000.000	0	0	0	1.660.000	3.000.000	0	0	0	83,00	100	0		0		
Penyediaan makanan dan minuman	22.400.000	50.000.000	20.000.000	0	0	22.400.000	50.000.000	20.000.000	0	0	100	100	100		0		
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	67.026.000	100.000.000	50.000.000	0	0	67.005.098	99.851.692	49.934.308	0	0	99,97	99,85	99,87		0		
Penyediaan jasa pegawai non PNS	72.276.000	134.000.000	140.350.000	0	0	71.832.560	133.294.400	140.315.520	0	0	99,39	99,47	99,98		0		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**196.214.000**	**392.805.000**	**106.686.000**	**1.628.238.950**	**0**	**192.490.601**	**389.266.642**	**106.391.500**	**1.623.699.850**	**0**	**98,10**	**99,10**	**99,72**		**0**	**464.788.790**	**462.369.719**
Pembangunan gedung kantor	0	100.000.000	0	0	0	0	98.630.000	0	0	0	0	98,63	0		0		
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	17.564.000	0	0	0	0	17.564.000	0	0	0	0	100	0			0		
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	20.000.000	70.000.000	0	0	0	20.000.000	69.454.000	0	0	0	100	99,22			0		
Pengadaan peralatan gedung kantor	46.650.000	71.450.000	45.686.000	725.703.847	0	46.650.000	70.768.000	45.584.000	724.962.347	0	100	99,05	99,78	99,90	0		
Pengadaan mebeleur	32.000.000	36.000.000	0	0	0	32.000.000	35.640.000	0	0	0	100	99,00			0		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	20.000.000	22.555.000	11.000.000	12.100.000	0	20.000.000	22.482.000	11.000.000	12.100.000	0	100	99,68	100	100	0		

Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	40.000.000	57.000.000	35.000.000	77.293.750	0	36.276.601	56.522.642	34.807.500	76.232.000	0	90,69	99,16	99,45	98,63			
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	10.000.000	20.000.000	0	0	0	10.000.000	20.000.000	0	0	0	100	100					
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10.000.000	15.800.000	15.000.000	19.388.900	0	10.000.000	15.770.000	15.000.000	19.388.900	0	100	99,81	100	100			
Penyediaan jasa surat menyurat	0	0	0	3.626.000	0	0	0	0	3.581.300	0				98,77			
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0	0	0	383.700.000	0	0	0	0	382.494.362	0				99,69			
Penyediaan jasa administrasi keuangan	0	0	0	26.700.000	0	0	0	0	26.375.000	0				98,78			
Penyediaan alat tulis kantor	0	0	0	110.803.200	0	0	0	0	110.803.200	0				100			
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0	0	0	21.790.200	0	0	0	0	21.790.200	0				100			
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0	0	0	9.986.900	0	0	0	0	9.986.900	0				100			
Penyediaan makanan dan minuman	0	0	0	31.400.000	0	0	0	0	31.400.000	0				100			

Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0	0	0	46.746.153	0	0	0	0	46.688.977	0				99,88			
Penyediaan jasa pegawai non PNS	0	0	0	159.000.000	0	0	0	0	157.896.664	0				99,31			
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	**28.000.000**	**30.000.000**	**0**	**0**	**0**	**28.000.000**	**29.740.000**	**0**	**0**	**0**	**100**	**99,13**				**11.600.000**	**11.548.000**
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	28.000.000	30.000.000	0	0	0	28.000.000	29.740.000	0	0	0	100	99,13					
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**52.292.200**	**95.445.000**	**25.000.000**	**98.846.050**	**0**	**52.291.200**	**95.445.000**	**24.975.000**	**98.846.050**	**0**	**100**	**100**	**99,90**	**100**		**54.316.650**	**54.311.450**
Pendidikan dan pelatihan formal	40.000.000	95.445.000	25.000.000	98.846.050	0	39.999.000	95.445.000	24.975.000	98.846.050	0	100	100	99,90	100			
Sosialisasi peraturan perundang-undangan	12.292.200	0	0	0	0	12.292.200	0	0	0	0	100						
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	**1.822.420.000**	**918.138.200**	**2.392.789.000**	**4.813.605.000**	**0**	**1.813.285.565**	**912.196.676**	**2.379.684.100**	**4.787.237.415**	**0**	**99,50**	**99,35**	**99,45**	**99,45**		**1.989.390.440**	**1.978.480.751**
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	0	0	305.000.000	1.764.538.000	0	0	0	301.013.787	1.751.201.500	0	0	0	98,69	99,24			

Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	141.000.000	50.000.000	61.035.000	0	0	140.723.000	49.769.500	60.949.700	0	0	99,80	99,54	99,86	0			
Pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana jaringan komunikasi dan informasi	733.000.000	259.751.500	0	0	0	729.257.909	258.327.860	0	0	0	99,49	99,45	0	0	0		
Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi berbasis web	345.000.000	54.000.000	0	0	0	340.868.656	53.768.000	0	0	0	98,80	99,57					
Monitoring implementasi e-Gov	28.200.000		0	0	0	28.190.000		0	0	0	99,96	0					
Layanan pengadaan secara elektronik (LPSE)	68.359.000	257.000.000	0	0	0	67.585.000	254.898.826	0	0	0	98,87	99,18					
Pemeliharaan dan pengembangan SIMGAJI	106.861.000	95.386.700	0	0	0	106.811.000	94.986.696	0	0	0	99,95	99,58					
Pengintegrasian sistem informasi/aplikasi sektoral (Smart City)	400.000.000	202.000.000	0	0	0	399.850.000	200.445.794	0	0	0	99,96	99,23					
Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	0	0	26.000.000	0	0	0	0	25.985.440	0	0			99,94				

Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	0	0	2.000.754.000	2.911.612.000	0	0	0	1.991.735.173	2.899.960.915	0			99,55	99,60	0		
Pembinaan dan pengelolaan persandiaan	0	0	0	137.455.000	0	0	0	0	136.075.000	0				99,00	0		
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	**85.250.000**	**49.000.000**	**0**	**0**	**0**	**78.645.224**	**48.873.134**	**0**	**0**	**0**	**92,25**	**99,74**	**0**	**0**	**0**	**26.850.000**	**25.503.672**
Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	85.250.000	49.000.000	0	0	0	78.645.224	48.873.134	0	0	0	92,25	99,74	0	0	0		
Program kerjasama informasi dengan mas media	**172.880.000**	**116.750.000**	**218.150.000**	**1.137.025.000**	**0**	**172.396.971**	**116.565.000**	**216.683.500**	**1.131.103.500**	**0**	**99,72**	**99,84**	**99,33**	**99,48**	**0**	**328.961.000**	**327.349.794**
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	50.000.000	26.750.000	218.150.000	1.011.860.000	0	49.864.000	26.575.000	216.683.500	1.006.195.000	0	99,73	99,35	99,33	99,44	0		
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	38.000.000	30.000.000	0	0	0	37.655.000	29.995.000	0	0	0	99,09	99,98	0	0	0		
Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	84.880.000	60.000.000	0	0	0	84.877.971	59.995.000	0	0	0	100	99,99	0	0	0		
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	0	0	0	63.175.000	0	0	0	0	63.175.000	0	0	0	0	100	0		

Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	0	0	0	61.990.000	0	0	0	0	61.733.500	0	0	0	0	99,59			
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	**153.720.000**	**113.000.000**	**85.775.000**	**0**	**0**	**149.757.000**	**112.372.000**	**85.655.000**	**0**	**0**	**97,42**	**99,44**	**99,86**	**0**	**0**	**70.499.000**	**69.556.800**
Penyusunan dan pengumpulan data perkembangan perekonomian Kabupaten	33.000.000	18.000.000	0	0	0	32.910.000	17.895.000	0	0	0	99,73	99,42	0	0	0		
Penyusunan dan Pengumpulan Data Analisis Indikator Kemiskinan	23.000.000	18.000.000	0	0	0	22.135.000	17.845.000	0	0	0	96,24	99,14	0	0	0		
Penyusunan dan pengumpulan data Indikator Kesejahteraan Petani	27.600.000	18.000.000	0	0	0	26.640.000	17.845.000	0	0	0	96,52	99,14	0	0	0		
Sosialisasi Buku Kabupaten dalam angka tahun 2016	5.120.000	0	0	0	0	5.120.000	0	0	0	0	100	0	0	0	0		
Sosialisai buku Kecamatan dalam angka tahun 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Penyusunan dan pengumpulan data indek perkembangan harga	30.000.000	18.000.000	0	0	0	29.200.000	17.942.000	0	0	0	97,33	99,68	0	0	0		

Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyusunan dan pengumpulan data indek perkembangan manusia	35.000.000	18.000.000	0	0	0	33.752.000	17.995.000	0	0	0	96,43	99,97	0	0	0		
Single Data System	0	23.000.000	0	0	0	0	22.850.000	0	0	0		99,35	0	0	0		
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	0	0	65.775.000	0	0	0	0	65.655.000	0	0	0	0	0	0	0		
Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah	0	0	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0		
Program Pengelolaan Persandian	**496.704.700**	**175.000.000**	**0**	**0**	**0**	**495.365.963**	**173.881.612**	**0**	**0**	**0**	**99,73**	**99,36**	**0**	**0**	**0**	**134.340.940**	**133.849.515**
Pembinaan dan pengelolaan persandiaan	496.704.700	175.000.000	0	0	0	495.365.963	173.881.612	0	0	0	99,73	99,36	0	0	0		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.934.698.871**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.186.939.774**	**-**
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.087.035.100**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	617.407.020	-
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0	0	0	0	2.844.835.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	568.967.020	-
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	0	0	0	242.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	48.440.000	-

Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.056.780.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**211.356.000**	-
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0	0	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4.800.000	-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	0	0	362.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	72.450.000	-
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	0	0	0	0	670.530.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	134.106.000	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**0**	**0**	**0**	**0**	**178.595.318**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**		-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	0	0	10.960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	39.953.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0	0	0	0	29.775.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		-
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0	0	0	0	23.252.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		-

Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	0	0	74.654.718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**0**	**0**	**0**	**0**	**144.173.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**		-
Pengadaan Mebel	0	0	0	0	52.373.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0	0	91.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**0**	**0**	**0**	**0**	**980.511.033**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**196.102.207**	-
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	0	0	0	978.511.033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0	0	487.604.320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		-

Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	0	0	0	0	97.682.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau BangunanLainnya + RSKW	0	0	0	0	389.921.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		-
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.412.975.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**282.595.040**	-
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.412.975.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**		
Pelayanan Informasi Publik	0	0	0	0	107.370.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		-
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	0	0	0	0	1.305.605.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		

Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.274.664.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**254.932.800**	**-**
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain diLingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**0**	**0**	**0**	**0**	**351.810.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**		**-**
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	0	0	0	0	351.810.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		-
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**0**	**0**	**0**	**0**	**922.854.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**		**-**
Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	0	0	0	0	97.760.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		-
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	0	0	0	0	431.277.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		-

Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	0	0	0	0	27.976.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		-
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	0	0	0	0	53.609.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		-
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan KomunikasiPemerintah Daerah	0	0	0	0	281.282.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		-
Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	**0**	**0**	**0**	**0**	30.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		-
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.962.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.992.540**	-
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.962.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**		-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	0	0	0	0	18.507.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		-

Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Membangun Metadata Statistik Sektoral	0	0	0	0	16.455.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		-
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	**0**	**0**	**0**	**0**	**86.050.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**17.210.000**	**-**
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**0**	**0**	**0**	**0**	**86.050.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**		**-**
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	0	0	0	0	36.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		-
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		-
TOTAL	**5.940.305.300**	**5.042.713.200**	**6.119.711.100**	**10.247.887.120**	**8.743.350.771**	**5.759.182.200**	**4.961.491.524**	**6.070.064.517**	**10.018.636.828**	0	**96,95**	**98,39**	**99,19**	**97,76**	**0,00**	**7.218.793.498**	**5.361.875.014**

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain :

2.4.1. Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak sebagai berikut :

a. Regulasi tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) masih baru. Pemerintah Kabupaten Demak baru menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, diperlukan banyak regulasi turunan untuk implementasinya.
b. Demak Smart City merupakan tantangan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkannya. Memerlukan infrastruktur teknologi informasi dan pendukungnya, selain juga dibutuhkan literasi digital bagi penduduknya. Kota Pintar adalah impian banyak kota/ kabupaten di Indonesia. Pelayanan yang mudah, cepat, murah dan terjamin kualitasnya merupakan wujud kota pintar
c. Jaringan intranet dan internet di lingkungan Pemkab Demak yang belum menjangkau ke seluruh wilayah/pusat pemerintahan, juga tantangan. Investasi akan infrastruktur teknologi informatika memerlukan biaya besar.
d. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan sumberdaya teknologi informasi, sistem keamanan informasi sangat dibutuhkan untuk menjamin keutuhan data. Standar Internasional diperlukan, sumberdaya manusia juga dibutuhkan.
e. Tuntutan keterbukaan informasi dalam menjalankan pemerintahan merupakan tantangan lain dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Sebagai pengelola data dan

informasi dibutuhkan ketelitian dan kecerdasan diplomasi dalam mengelola data dan informasi.

f. Tantangan lain adalah tentang data. Banyak sumber data namun kadang berbeda, untuk itu diperlukan regulasi tentang Satu Data Demak yang terintegrasi melalui Single Data System;
g. Informasi sangat dibutuhkan dan merupakan hak masyarakat, untuk itu tantangan dalam publikasi pembangunan daerah sangat diperlukan secara masif melalui berbagai kanal media.

2.4.2. Peluang

Peluang bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah sebagai berikut :

a. Kebijakan tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) didasari Perpres nomor 95 tahhun 2018 sehingga peluang memanfaatkan aplikasi umum dan berbagi pakai terbuka lluas misalnya SIMANTRA sebagai sistim penghubung layanan SPBE di Pemerintah Kabupaten Demak.
b. Peraturan Bupati Demak tentang Masterplan Demak Smart City tahun 2019-2029 yang telah disusun pada tahun 2019, sebagai landasan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Demak.
c. Kersediaan jaringan intranet dan internet hingga wilayah terjauh/terpencil sebagai modal utama dalam pengembangan teknologi informasi hingga ke pelosok wilayah.
d. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) selalu mendorong dan memberikan fasilitas dalam peningkatan keamanan informasi;
e. Situs demakkab.go.id, Media sosial : facebook, twitter, whatsapp, Instagram, youtube sebagai media digital mempercepat penyebaran informasi pembangunan

didukung oleh media radio suara kota wali, dan media luar ruang seperti : baliho, banner, MMT, stiker;

f. Kebijakan Satu data Indonesia memberikan peluang Satu data demak terintegrasi.
g. Undang undang nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik memberi peluang keterbukaan dalam mengelola informasi pemerintah daerah yang merupakan hak masyarakat.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

Permasalahan utama pembangunan daerah di Kabupaten Demak, yakni: "**Belum optimalnya kualitas kesejahteraan masyarakat Demak**". Yang dijabarkan ke dalam 5 (lima) permasalahan pokok dengan rincian sebagai berikut:

1. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
2. Belum optimalnya pengembangan kualitas dan daya saing SDM
3. Tingginya potensi penurunan kualitas lingkungan hidup
4. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah dalam menyejahterakan masyarakat
5. Belum optimalnya kapasitas infrastruktur dasar pembangunan daerah

Permasalahan daerah tersebut di atas merupakan permasalahan yang bersifat lintas sektor dan membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak Birokrasi yang kapabel meliputi empat area perubahan yaitu manajemen perubahan, organisasi, tata laksana dan sumber daya aparatur. Kompetensi dan kualitas ASN perlu ditingkatkan guna mendukung percepatan pelayanan prima. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik masih memerlukan penguatan demi mendukung RB 4.0. Penataan organisasi menjadi salah satu hal yang perlu diantisipasi pula di tahun-tahun mendatang menyusul kebijakan penyederhanaan birokrasi. Tahun 2022 diperkirakan menjadi tahun pertama penyederhanaan birokrasi, sehingga perlu dilakukan sejumlah penyesuaian dalam tata kelola pemerintahan.

Adapun Pokok permasalahan Pemerintahan Kabupaten Demak yang merujuk pada bidang urusan Kominfo, Urusan Statistik dan urusan Persan dian adalah sbb :

Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Belum optimalnya pelayanan internal pemerintahan pada masing-masing perangkat daerah
		Belum optimalnya kesinambungan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan
		Implementasi pelaksanaan tata kelola kelembagaan dan sistem pemerintahan belum optimal
		Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian internal secara menyeluruh dan kontinyu di setiap unsur Pemerintahan Kabupaten Demak
		Belum tertibnya pengelolaan keuangan dan aset BMD
		Masih terdapat penempatan kerja yang belum sesuai dengan kompetensi ASN
	Belum optimalny	Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan publik
		Belum terintegrasinya kinerja pemerintahan berbasis

Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
	a pelayanan publik kepada masyarakat	teknologi informasi di setiap perangkat daerah

Dalam Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah bersifat lintas sektoral dan membutuhkan intervensi oleh berbagai pihak, maka permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah hasil identifikasi permasalahan yang terjadi dalam suatu urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Sedangkan Bidang urusan yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Urusan Kominfo, Urusan Statistik dan. Identifikasi permasalahan urusan akan membantu pemerintah daerah untuk mendistribusikan kebijakan-kebijakan yang memerlukan cross cutting program, kegiatan dan sub kegiatan atau permasalahan yang cukup ditangani oleh Bidang. Penyajian permasalahan urusan juga urusan Dalam pembangunan daerah, permasalahan urusan pembangunan yang dirumuskan akan memberikan sinkronisasi terhadap perencanaan Bidang dalam menyusun rencana Renja sehingga terdapat integrasi permasalahan per bidang urusan Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi permasalahan Pemerintahan Kabupaten Demak.

Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pada Era industri 4.0 menemukan momentum lecutan di tengah pandemi Covid-19. Sektor yang semakin banyak menyumbang pertumbuhan ekonomi ini, menjadi salah satu sektor yang patut diperhitungkan dalam beberapa tahun ke depan. Namun, masih ditemukan sejumlah permasalahan, yaitu:

1. Urusan Komunikasi dan Informatika

b) belum optimalnya layanan dan jangkauan jaringan telekomunikasi;
c) aplikasi-aplikasi *e-government* belum terintegrasi;
d) layanan informasi dan komunikasi publik belum optimal

2. Statistik

Belum optimalnya penggunaan single data system (SDS). Data-data sektoral yang digunakan dalam perencanaan dan pengendalian terkadang berasal dari sumber yang berbeda sehingga menimbulkan kesalahan pengambilan keputusan. Data yang dibutuhkan dalam

perencanaan pun seringkali belum tersedia tepat waktu sesuai tata kelola perencanaan.

3. Persandian

Urusan persandian perlu mendapat perhatian seiring dengan meningkatnya lalu lintas informasi. Jaringan keamanan informasi Kabupaten Demak masih rentan diretas.

Berdasarkan perumusan permasalahan pokok tersebut diatas dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Dinas Komunikasi dan Informatika serta melalui telaahan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah merupakan rujukan penentuan isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 58 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak yaitu: "***Belum optimalanya layanan dan jangkauan Jaringan Telekomunikasi, Layanan informasi dan komunikasi publik, penggunaan single data system (SDS), aplikasi-aplikasi e-Government belum terintegrasi secara penuh, dan Sistem keamanan informasi masih rentan diretas.***" yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Permasalahan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
A	Urusan Komunikasi dan informasi		

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Belum optimalnya layanan dan jangkauan Jaringan Telekomunikasi	1. Belum optimalnya pemerataan fasilitas akses informasi publik dan internet sehat;	1. Penyebaran layanan operator telepon seluler tidak merata sehingga masih adanya beberapa wilayah yang susah sinyal (243 menara TW 3) 2. Literasi Digital belum menjangkau ke seluruh lapisan masyakat
		2. Kualitas jaringan intranet dan internet belum optimal	1. Pengelolaan Network Operation Centre (NOC) belum sesuai standar ISO 2. jumlah tenaga TI belum mencukupi
2	Aplikasi-aplikasi e-Government belum terintegrasi	1. Banyaknya aplikasi yang dibangun belum memiliki application protocol interface (API)	1. Masih adanya ego sektoral perangkat daerah dalam pembangunan aplikasi 2. Pembuatan aplikasi belum terkoordinasi dengan Kominfo (166 aplikasi terdiri dr aplikasi pusat dan mandiri dengan platform yang berbeda) 3. Jumlah tenaga TI belum mencukupi
3	Layanan informasi dan komunikasi publik belum optimal	1. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penyebarluasan informasi program dan kegiatan pemerintah;	1. Belum optimalnya pemberdayaan Forum Komunikasi Media Tradisional (FK-Metra) dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). 2. Informasi yang disampaikan melalui website dan medsos kurang “viral” sehingga kurang menarik untuk disebarluaskan. 3. Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik (KIP) perlu ditingkatkan 4. Belum adanya SDM yang punya kompetensi jurnalistik kontemporer
		2. Informasi pembangunan yang dilakukan pemerintah belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat	1. Masih ada berita palsu (hoax) di media social 2. Kerjasama dengan mitra dan jejaring belum optimal 3. Belum tersedia sarana dan prasarana penghubung komunikasi antara dispatcher/(petugas operator dan renpondermenjawab 4. Berita pembangunan daerah belum massif
B	**Urusan Statistik**		
	Belum optimalnya penggunaan *single data system* (SDS).	1. Terdapat variasi sumber data	1. Validasi, pemanfaatan, pengelolaan dan up dating data sektoral yang belum optimal
		2 Data yang dibutuhkan dalam perencanaan belum tersedia tepat waktu	1. Pelaksana kegiatan tidak berinisiatif menyampaikan data kepada admin. 2. Data makro dari BPS belum lengkap (PDRB, kemiskinan, IPM, dll)
C	**Urusan persandian**		
	Sistem keamanan informasi masih rentan diretas.	1. Penyelenggaraan persandian belum optimal	1. Laju Perkembangan tekhnologi Informasi yang cepat 2. Keterbatasan SDM yang kompeten dan Sarana Prasarana pendukung

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
		2 Pengelolaan Keamanan informasi belum optimal	1. Kurangnya pemahaman pentingnya keamanan informasi (KAMI). 2. Asesmen Keamanan informasi baru sebagian dilaksanakan 3. Sistem Informasi yang digunakan masih mudah di retas

Berdasarkan uraian di atas dan data informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, maka akar permasalahan dari permasalahan pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak dapat dirincikan sebagai berikut:

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Demak

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Demak serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, Maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Bupati

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak sebagai unsur pelaksana dinas teknis mendukung misi kesatu Bupati Demak yaitu memperkuat tatakelola pemerintahan yang baik, serta kehidupan bermasyarakat yang agamis, kondusif dan berbudaya. Misi ini untuk mendukung tujuan kesatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yauti meningkakan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kabupaten Demak pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kabupaten Demak menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Demak baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kabupaten Demak untuk periode 2021-2026 adalah :

“DEMAK BERMARTABAT, MAJU, DAN SEJAHTERA”

dengan misi tersebut sebagai berikut :

1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang baik, serta kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya;
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidip yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
3. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan pengangguran.

Dari misi tersebut, Dinas komunikasi dan Informatika memiliki tugas untuk mendukung dan melaksanakan tercapainya **Misi 1** yaitu : **"Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang baik, serta kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya"** untuk pelaksanaan urusan Kominfo, Urusan Statistik dan Persandian

Selain itu untuk Dinas Komunikasi dan Informatika juga secara langsung akan berkontribusi mendukung 3 Program unggulan Bupati antara lain :

1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan public berbasis " Smart City"
2. Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan
3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Masyarakat

Dalam RPJMD memiliki beberapa tujuan dan sasaran sedangkan Dinas Kominfo melaksanakan satu tujuan yaitu : **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih** dengan indiaktor Indeks Reformasi Birokrasi dan memiliki 2 sasaran antara lain :

1. Meningkatnya kinerja pelayanan publik Pemerintahan Daerah dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah dengan Indikator Nilai SAKIP Daerah

Dalam upaya pencapaian misi dan program unggulan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika yang melaksanakan urusan penunjang di bidang urusan Komunikasi dan Informatika, urusan statistik dan urusan persandian yang mempunyai 3 tujuan sebagai Beriku :

1. Meningkatkan pelayanan publik tiap Perangkat Daerah;
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;

3. Meningkatkan kinerja pemerintahan berbasis elektronik dalam mendukung akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah

3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Komunikasi dan Informatika RI

Visi Kemenkominfo wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden adalah Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong. **Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika** sesuai dengan perannya, Kemenkominfo dapat mendukung pelaksanaan misi Presiden dan Wakil Presiden melalui tugasnya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, sebagai berikut :

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan; dan
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Komunikasi dan Informatika

Keselarasan misi Dinas komunikasi dan Informatka Kabupaten Demak dengan misi Kementrian Komunikasi dan Informatika adalah pada misi menyelenggarakan peayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan.

Sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika tahun 2020 – 2024 salah satunya adalah Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan

demikian salah satu sasaran strategis Kementrian Kominfo sangat mendukung sasaran strategis pembangunan di Kabupaten Demak pada pembangunan jangka menengah yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih,

3.3.2 Telaah Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah adalah menyusun rencana indeks SPBE, meningkatkan ketersediaan infrastruktur TIK, meningkatkan aplikasi yang terintegrasi, meningkatkan layanan pengaduan elektronik, meningkatkan kualitas informasi dan komunikasi publik, meningkatkan ketersediaan data statistik sektoral Jawa Tengah, menyusun standar keamanan informasi dan persandian daerah, melaksanakan pembinaan keamanan informasi dan persandian daerah, meningkatkan kapasitas pengelola keamanan informasi dan persandian daerah, meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja Dinkominfo Provinsi Jawa Tengah, meningkatkan kapasitas SDM, meningkatkan sarana prasarana pendukung kinerja dan meningkatkan system administrasi umum dan keuangan serta kersipan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah yang mendukung visi Gubernur Provinsi Jawa Tengah **"Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi",.**

Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsive;
2. Meningkatnya capaian sasaran strategis tiap Perangkat Daerah;
3. Meningkatnya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
4. Meningkatnya kualitas keamanan informasi;
5. Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

4.3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang sehingga segala bentuk perencananan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku Kabupaten Demak telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak 6 Tahun 2011 tentang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031.

Dengan berjalannya aktivitas pemanfaatan ruang yang dinamis, perkembangan kebijakan dan dinamika pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Demak dan daerah sekitarnya telah mempengaruhi penataan ruang wilayah Kabupaten Demak sehingga dilakukan peninjauan kembali terhadap rencana tata ruang wilayah.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting, rencana implementasi program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak selama 5 (lima) tahun yang akan datang (Tahun 2021-2026) tidak ada yang pembangunan fisik dengan skala besar sehingga harus mempertimbangkan kebijakan-kebijakan pengaturan zonasi ataupun pemanfaatan ruang dalam dokummen RTRW Kabupaten Demak. Yang dilakukan pemerintah Kabupaten Demak dalam rangka penyusunan Renstra Kabupaten Demak 2021-2026, tidak ditemukan indikasi program dan kegiatan pada urusan Statistik, urusan persandian dan fungsi penunjang yang berdampak strategis terhadap pemerintahan di Kabupaten Demak sedangkan urusan Komunikasi dan infomasi terdapat pemetaan indikasi program utama tetapi tidak berdampak strategis (besar) terhadap RTRW Kabupaten Demak akan tetapi menjadi indikasi program utama Kementrian Kominfo, PT Telkom dan Swasta. untuk **kawasan strategi** dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Indikasi Program RTRW Kabupaten Demak Tahun 2021-2025

No	Program Utama	Lokasi	Sumber dana	Instansi Pelaksana
1	Perwujudan Sistem Telekomunikasi			
	Peningkatan kualitas pelayanan telepon di setiap kecamatan	Seluruh Kabupaten	APBN dan Swasta	Kementrian Kominfo, PT Telkom dan Swasta
	Pembangunan instalasi baru dan pengoperasian instalasi penyaluran	Seluruh Kabupaten	APBN dan Swasta	Kementrian Kominfo, PT Telkom dan Swasta
	Pengembangan menara telekomunikasi di setiap kecamatan	Seluruh Kabupaten	APBN dan Swasta	Kementrian Kominfo, PT Telkom dan Swasta

Sumber: RTRW Kab.Demak Tahun 2021-2025

3.3.4 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan jangka menengah adalah Pengkatan kualitas Saing SDM dengan cara Meningkatkan ketrampilan dan pelatihan kepada masyarakat terutama tentang teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki tugas untuk menindaklanjuti salah satu rekomendasi KLHS, yakni sasaran strategis peningkatan kualitas saing sumber daya manusia melalui kegiatan kegiatan Meningkatkan ketrampilan dan pelatihan kepada masyarakat terutama tentang teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

Rumusan isu strategis tujuan pembangunan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten terakit dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Isu Strategis Lingkungan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)
Kabupaten Demak – Pilar Sosial

No TPB	Tujuan Pembangunan	Isu Strategis
T04	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	Peningkatan kualitas Saing sumber daya manusia

Sumber: KLHS Kab. Demak

Sasaran strategis Meningkatkan aksesibilitas pendidikan pada semua jenjang pendidikan dengan didukung sarana sekolah yang memadai merupakan target yang harus dicapai. Sasaran strategis ini merupakan solusi dari permasalahan strategis yaitu proporsi remaja dan dewasa dengan ketrampilan TIK, Proporsi sekolah dengan akses ke internet, komputer untuk tujuan pengajaran.

Berikut merupakan sasaran strategis menurut pilar pembangunan berkelanjutan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak.

Tabel 3.4
Sasaran Strategis Kabupaten Demak – Pilar Sosial

Isu Stretegis	Permasalahan Strategis	Sasaran Strategis
PILAR SOSIAL		
Peningkatan kualitas saing sumber daya manusia	• Proporsi remaja dan dewasa dengan ketrampilan TIK • Proporsi sekolah dengan akses ke internet , komputer untuk tujuan pengajaran.	Meningkatkan aksesibilitas pendidikan pada semua jenjang pendidikan dengan didukung sarana sekolah yang memadai

Sumber: : KLHS Kabupaten Demak

Dalam rangka meningkatkan usaha mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, maka perlu adanya program pembangunan dan pengembangan yang harus masuk dalam APBD Kabupaten Demak. Berikut ini merupakan program untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pada dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak yang berkaitan bidang urusan komunikasi dan informasi, urusan statistik dan urusan persandian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Rekomendasi Pencapaian TPB
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

Isu Stretegis	Sasaran Strategis	Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator	Target					Pagu Indikatif	Sumber Pendanaan	OPD
				2022	2023	2024	2025	2026			
Pilar Sosial											
Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan aksesibilitas pendidikan pada semua jenjang pendidikan dengan	Program Aplikasi Informatika	Persentase aplikasi e-gov yang dikelola	50%	60%	70%	90%	100%	2.609.258.000	APBD	Kominfo

Isu Stretegis	Sasaran Strategis	Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator	Target					Pagu Indikatif	Sumber Pendanaan	OPD
				2022	2023	2024	2025	2026			
	didukung sarana sekolah yang memadai										
		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koneksi Jaringan Intra Pemerintah.	41	41	41	41	41			
		Meningkatkan ketrampilan dan pelatihan kepada masyarakat terutama tentang teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Jumlah orang yag dilatih	100	200	300	400	500			
		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah jaringan komunikasi Intra Pemerintah yang terpelihara dan infrastruktur menara telekomunikasi yang berijin	186	200	220	240	250			
		Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi dan komunikasi yang diterima masyarakat	65%	70%	75%	80%	100%	3.041.064.800	APBD	Kominfo
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi dan informasi publik yang dikelola	4	4	4	4	4			
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	3	3	3	4	4			

2.6. Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, telaahan RTRW Daerah Nomor

1 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 dan telaahan kajian lingkungan hidup strategis, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Perencananan dan Evaluasi Perangkat daerah
2. Belum Optimalnya Layanan dan Jangakauan Jaringan Telekomunikasi
3. Aplikasi-aplikasi E-Government belum Terintegrasi
4. Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Belum Optimal
5. Belum Optimalnya Penggunaan Single Data System (SDS)
6. Sistem Keamanan Informasi masih Rentan diretas

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), mengamanatkan bahwa Visi dan Misi setiap Perangkat Daerah (PD) di lingkup Kabupaten Demak berpedoman pada visi dan misi Bupati yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 sesuai tugas dan fungsi PD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Adapun misi Pemerintahan Kabupaten ada 2 sbb :

Unsur Visi	No Misi	Uraian Misi
Bermartabat	1	Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya.
Maju	2	Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berdaya Saing
Sejahtera	3	Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran

Pada penyusunan Renstra periode tahun 2021-2026 visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak sesuai dengan visi Bermartabat dan Visi ke 1 yaitu " Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya " RPJMD kemudian Renstra menterjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak.

4.1. Tujuan dan Sasaran

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu Bupati dalam mencapai visi dan misi

bidang urusan Komunikasi dan Informasi, bidang statistik dan urusan persandian. Tujuan dan sasaran merupakan impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Impact tersebut harus memberi ultimate goal dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika untuk periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tujuan :

1. Meningkatkan pelayanan publik Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Demak;
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Demak;;
3. Meningkatkan kinerja pemerintahan berbasis elektronik dalam mendukung akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah

Sasaran :

Dalam rangka mencapai tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah :

1. Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti;
2. Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Demak; yang mencapai target;
3. Indeks Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
4. Indeks Keamanan Informasi;
5. Indeks tata kelola SPBE.

TABEL 4.1
TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR BESERTA TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH

NO	TUJUAN/Sasaran	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD		TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
					2020 (realisasi)	2021 (target)	2022	2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	**Tujuan 1** **Meningkatkan pelayanan publik tiap Perangkat Daerah**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) OPD**	**Hasil pengukuran survey kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan berpedoman pada PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017.**	Angka	90,09	90,09	90,10	90,11	90,12	90,13	90,14	90,14
2	Sasaran 1 Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsive	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Perbandingan antara Jumlah keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan jumlah semua keluhan yang masuk	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3	**Tujuan 2** **Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP Dinas komunikasi dan Informatika**	**Penilaian dilakukan oleh Inspektorat Kaupaten Demak berdasarkan KemenPAN RB no 12 Tahun 2015**	Angka	82,04	82,04	82,54	83,04	83,54	84,04	84,54	84,54
4	Sasaran 2 Meningkatnya capaian sasaran strategis tiap Perangkat Daerah	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	Perbandingan Jumlah Indikator kinerja sasaran strategis PD yang mencapai target dengan jumlah seluruh capaian kinerja sasaran strategis PD	%	100	100	100	100	100	100	100	100
5	**Tujuan 3** **Meningkatkan kinerja pemerintahan berbasis elektronik dalam mendukung akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah**	**Indeks SPBE**	**Nilai indeks yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE sesuai dengan peraturan MenPANRB no 5 Tahun 2020 meliputi Domain :** **1. Tata Kelola SPBE** **2. Layanan SPBE** **3. Kebijakan (Keamaanan Teknologi informasi dan Komunikasi)**	Angka	3,74	3,00	2,942	2,943	2,944	2,945	3,00	3,00

NO	TUJUAN/Sasaran	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD		TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
					2020 (realisasi)	2021 (target)	2022	2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
6	**Sasaran 3** Meningkatnya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indikator dalam indeks yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE sesuai denganperaturan MenPANRB no 5 Tahun 2020 meliputi : 1. Administrasi Pemerintahan 2. Pelayanan Publik (Keterbukaan Informasi Publik, Data)	Angka	3,94	2,82	2,84	2,86	2,88	2,90	2,93	2,93
7	**Sasaran5** Meningkatnya kualitas keamanan informasi	Indeks Keamanan Informasi	Hasil evaluasi dari BSSN terkait Tingkat kesiapan kabupaten tentang Kelengkapan dan Kematangan dalam penerapan keamanan informasi meliputi 5 aspek antara lain : 1.Tata Kelola, 2. Pengelolaan Risiko, 3. Kerangka Kerja, 4. Pengelolaan Aset, 5. Aspek Teknologi.	Angka	n/a	1,00	1,70	2,20	2,50	2,70	3,00	3,00
8	**Sasaran 6** Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks tata kelola SPBE	Indikator dalam indeks yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE sesuai denganperaturan MenPANRB no 5 Tahun 2020 meliputi : 1. Kelembagaan 2. Strategi dan Perencanaan 3. TIK	Angka	3,57	2,94	2,95	2,96	2,97	2,98	3,00	3,00

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* tentang bagaimana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

5.1.1. Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi dan langkah-langkah sbb :

1. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan peningkatkan kualitas perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas komunikasi dan Informatika dirumuskan pada **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu** dengan upaya meningkatkan Kualitas pelayanan sesuai standar pelayanan dan meningkatkan persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti
2. Penguatan dan Pengintegrasian Tata Kelola Informasi dan Kemitraan Komunikasi Publik dirumuskan pada **Program Aplikasi Informatika**, yaitu meningkatkan persentase aplikasi e-gov yang terintegrasi dengan portal daerah agar pengelolaan komunikasi publik dapat efektif dan terorganisir
3. Peningkatan Akses Informasi **Publik dirumuskan pada Program Informasi dan komunikasi publik**, yaitu dengan Perluasan Integrasi Layanan Publik dan kelembagaan dan

Penguatan jaringan internet/intranet, komunikasi publik melalui media sosial dan media massa, agar Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Tingkat Jawa Tengah dapat tercapai.

4. Menyusun skema layanan *digital signature* dan pengamanan sistem informasi daerah dirumuskan pada **Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi** , yaitu dengan upaya percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) agar meningkatkan persentase keamanan informasi pemerintah daerah
5. Membangun pusat data digital Demak dirumuskan pada **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**, yaitu dengan Mempercepat pembangunan Pusat Data Demak menuju Satu Data Indonesia agar Ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi meningkat

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak dihasilkan dari hasil analisis strategis dan kebijakan yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan pelaksanaan sebuah aktivitas dalam kurun waktu 5 tahun.

Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif, sesuai dengan Visi dan Misi Pemererintah Kabupaten Demak baik jangka pendek dan jangka panjang.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi dan Kebijakan untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak dijelaskan sebagai berikut.

5.1.2. Kebijakan

Arah kebijakan Renstra Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak ditetapkan dengan fokus renja tahunan sejak tahun 2021 hingga tahun 2026. Pada masing-masing Program disusun prioritas Program/urusan yang akan dilaksanakan 5 tahun kedepan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan dan sasaran.

Kebijakan pembangunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak. Adapun tahapan perencanaan yang akan dilakukan sdalah sbb :

Tabel 5.1.
Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak
Tahun 2021-2026

Strategi (Prioritas)	Kebijakan	Arah Kebijakan				
		2022	2023	2024	2025	2026
1. Peningkatan akuntabilitas kinerja 2. Meningkatkan kualitas perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Kominfo	1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja 2.Meningkatkan Kualitas perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	1. Peningkatan perencanaan dan evaluasi, 2. peningkatan sarana kearsipan	1. peningkatan sarana prasarana pendukung layanan, 2. penguatan SDM, pendukung layanan, 3. peningkatan kapasitas SDM kearsipan	1. peningkatan Sarana administrasi umum dan keuangan 2. Penguatan SDM Adm umum dan keuangan	Membangun system administrasi pemerintahan berbasis TI	Pengembangan system administrasi pemerintahan berbasisi TI
3. Penguatan dan Pengintegrasian Tata Kelola Informasi dan Kemitraan Komunikasi	Membangun pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan terorganisir	1. Membangun aplikasi informasi publik terintegrasi 2.Diseminasi dan distribusi informasi melalui media massa maupun media komunikasi	Evaluasi aplikasi keterbukaan informasi publik	Membangun kemitraan dengan media masa lokal	Membangun kemitraan dengan media masa nasional	Peningkatan kualitas layanan informasi publik melalui penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas

Strategi (Prioritas)	Kebijakan	Arah Kebijakan				
		2022	2023	2024	2025	2026
publik		lainnya serta kemitraan media.				
Peningkatan Akses Informasi Publik	1. Perluasan Integrasi Layanan Publik dan kelembagaan	2. Menyusun Arsitektur SPBE	Review peta Rencana SPBE	Penguatan Pembangunan TIK	Penguatan Integrasi TIK	Monev SPBE
	2. Penguatan jaringan internet / intranet	Menyusun Arsitektur Infrastruktur SPBE	Penguatan Jaringan FO Sektor 1	Penguatan Jaringan FO Sektor 2	Penguatan Jaringan FO Sektor 3	Penguatan Jaringan FO Sektor 4
Menyusun skema layanan *digital signature* dan pengamanan sistem informasi daerah	Mendukung percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Implementasi Sertifikat Elektronik Pada Layanan Public	Penyusunan Pedoman Standar Keamanan Informasi	Penguatan Persandian Dan Keamanan Informasi	Peningkatan SDM Persandian Dan Kemanan nformasi	Pembinaan Dan Pengendalian Standarisasi Dan Keamanan Informasi
Membangun pusat data digital demak	Mempercepat pembangunan Pusat Data Demak menuju Satu Data Indonesia	1. Meningkatkan ketersedian data dan informasi sektoral melelui SDS dan open data untuk mendukung keterbukaan informasi.	1. Penyusunan regulasi dan kelembagaan jaringan informasi geospasial daerah. 2. Meningkatkan ketersedian data dan informasi geospasial melalui integrasi data dan informasi statistik dengan. data spasial daerah	1. Meningkatkan Cakupan Analisis Data 2. Integrasi sistem aplikasi SDS dan open data dengan aplikasi Smart City.	1. Meningkatkan Cakupan Analisis Data Melalui Super Eksekutif Demak Data Base (SEDEB)	1. Meningkatkan data tentang data (metadata) dari masing-masing jenis data sektoral 2. Monitoring dan evaluasi peningkatan layanan data sektoral

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Strategi	Arah Kebijakan	2022	2023	2024	2025	2026
VISI : Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera										
Misi 1 : **Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya**										
Tujuan 1. Meningkatkan pelayanan publik tiap Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) OPD	TERWUJUDNYA PELAYANAN MASYARAKAT YANG REPONSIF	Jumlah keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti dibagi jumlah keluhan masyarakat yang masuk	Meningkatkan kualitas perencanaan danpengganggaran	Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan aset Perangkat Daerah	**1**	**1**			

Tujuan 2 Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas komunikasi dan Informatika	MENINGKATNYA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS TIAP PERANGKAT DAERAH	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	Peningkatan akuntabilitas kinerja	• Peningkatan monitoring dan evaluasi • Peningk atan kualitas sumber daya ASN Perangkat Daerah				**1**	**1**
Tujuan 3. Meningkatkan kinerja pemerintahan berbasis elektronik dalam mendukung akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah	Indeks SPBE	MENINGKATNYA LAYANAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)	Indeks Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	• Peningkatan Akses Informasi Publik	• Perluasan Integrasi Layanan Publik dan kelembagaan	**1**	**1**	**1**	**1**	
				• Membangun pusat data digital demak	• Mempercepat Pengelolaan Data Demak menuju Satu Data Indonesia	**1**	**1**	**1**	**1**	
		MENINGKATNA KUALITAS KEAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi	• Menyusun skema layanan digital signature dan pengamanan sistem informasi daerah	• Mendukung percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
		MENINGKATNYA TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)	Indeks tata kelola SPBE	• Penguatan dan Pengintegrasian Tata Kelola Informasi dan Kemitraan Komunikasi Publik	• Membangun pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan terorganisir	**1**	**1**	**1**		

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026) meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kabupaten Demak dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kabupaten Demak 2021 - 2026.

Program kegiatan yang digunakan dalam Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 adalah program kegiatan serta sub kegiatan yang telah dikunci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Agar bisa menjawab indikator pada tujuan dan sasaran maka penyelerasan indikator program yang bersifat outcome sangat diperlukan, sehingga meskipun nomenklatur program, kegiatan serta sub kegiatan telah terkunci namun Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Demak mampu menjawab indikator yang telah ditetapkan dalam tujuan dan sasaran melalui indikator pada program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut. Program, kegiatan dan Sub kegiatan ini merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Komunikasi Dan Informatika

Kabupaten Demak untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu melalui pelaksanaan 5 program, 12 kegiatan dan 43 sub kegiatan, Sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
    a Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
        1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
        2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
        3) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
        4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDJumlah dokumen RKA
    b Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
        1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
        2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
    c Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
        1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
        2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    d Administrasi Umum Perangkat Daerah
        1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
        2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
        3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
        4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
        5) Penyelenggaraan Rpat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
    e Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
        1) Pengadaan Kendaraan Dinas
        2) Pengadaan Mebel
        3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
        4) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

f Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan
   2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau BangunanLainnya

g Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
   2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
   3) Sosialisasi peraturan Perundang-undang//

2. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
   a Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
      1) Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
      2) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
      3) Pelayanan Informasi Publik
      4) Pengelolaan Media Komunikasi Publik.

3. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
   a Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
      1) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE
      2) Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)
      3) Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
      4) Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
      5) Penyelenggaraan Sistem Jaringan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah

b Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1) Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

a Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
2) Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
3) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
4) Membangun Metadata Statistik Sektoral

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

a Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1) Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2) Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
3) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak juga melaksanakan Rencana Program dan kegiatan prioritas mengacu pada program prioritas Bupati Demak sbb :

1. Prioritas program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis "SMART CITY", dengan kegiatan **integrasi aplikasi e-government**, Papperless Office (Administrasi Kantor Hemat Kertas), Digitalisasi Desa, soport jaringan pada Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM), **Pengembangan Single Database (Kebijakan Satu Data)** dan support jaringan pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP).
2. Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, dengan kegiatan mendukung keberhasilan *Literasi Berbasis Inklusi Social, pembangunan taman-taman Baca Integrative dan Percepatan Penanganan Covid-19 dan Stunting*
3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Masyarakat bersama dengan dinas terkait mendukung kegiatan Pelatihan Start Up Wirausaha Muda.

Adapun program prioritas Secara Rinci dapat dilihat pada table 6.1 sedangkan Program dan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak, target, indikasi pagu anggaran dari tahun 2020 s/d 2026 terdapat pada Tabel 6.2. dibawah ini.

Tabel 6.1

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

NO	Program/Indikator Prioritas	Indikator	Satuan	Data awal (2020)	2022		2023		2024		2025		2026		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah		
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Program	Kegiatan	Sub kegiatan
1	**Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Public Berbasis "SMART CITY"**	**Persentase aplikasi e-gov yang dikelola**													**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**		
a	Integrasi E-government	Jumlah aplikasi yang terintegrasi	Aplikasi	2	0	-	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
b	Papperless Office (Administrasi Kantor Hemat Kertas)	OPD yang menerapkan e-Office	OPD	10	0	-	25	25.000.000	30	25.000.000	35	25.000.000	41	25.000.000	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
c	Digitalisasi Desa	Jumlah desa yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah melalui VPN	*Desa*	0	*0*	-	*60*	*50.000.000*	*61*	*58.000.000*	*61*	*62.000.000*	*61*	*82.000.000*	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah

NO	Program/Indikator Prioritas	Indikator	Satuan	Data awal (2020)	2022		2023		2024		2025		2026		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah		
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Program	Kegiatan	Sub kegiatan
d	***Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)***	Suport jaringan Anjungan Dukcapil Mandiri	*ADM*	0	*0*	-	*2 MPP*	*20.000.000*	*2 Kec. gajah dan sayung*	*20.000.000*	*2 Kec. Demp et dan Bonang*	*20.000.000*	*0*	-	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
e	Pengembangan Single Database (Kebijakan Satu Data)	Jumlah kelengkapan metadata data sektoral	*meta data*	*500*	*600*	*18.309.500*	*700*	*30.000.000*	*800*	*30.000.000*	*900*	*30.000.000*	*1000*	*30.000.000*	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah	Membangun Metadata Statistik Sektoral
f	***Mall Pelayanan Publik (MPP)***	Suport jaringan Mall Pelayanan Publik yang terlayani jaringan internet	Mall Pelayanan Punlik	0	0	0	1	83.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
2	**Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan**	**Persentase Informasi dan komunikasi yang diterima masyarakat**													**Program Informasi dan Komunikasi Publik**		
	Literasi Berbasis Inklusi Social	**Jumlah berita tentang literasi berbasis inklusi sosial**	Berita	-	*4*	5.000.000	*4*	5.500.000	4	6.050.000	4	6.655.000	4	7.320.500	**Program Informasi dan Komunikasi Publik**	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Pengelolaan Media Komunikasi Publik*

NO	Program/Indikator Prioritas	Indikator	Satuan	Data awal (2020)	2022		2023		2024		2025		2026		Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah		
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Program	Kegiatan	Sub kegiatan
	Taman Baca Integrative	**Jumlah Taman Baca yang terlayani jaringan Internet**	**Taman Baca**	**0**	**15**	-	**14**	25.000.000	**14**	50.000.000	**14**	50.000.000	**14**	50.000.000	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
	Percepatan Penanganan Covid-19 dan Stunting	**Jumlah desiminasi dan publikasi tentang penanganan covid 19 dan stunting**	Berita/publikasi/baliho	-	*1*	3.600.000	*100*	20.000.000	*100*	20.000.000	*100*	20.000.000	*100*	20.000.000	**Program Informasi dan Komunikasi Publik**	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Pengelolaan Media Komunikasi Publik*
3	**Percepatan Pemulihan Ekonomi Masyarakat**														**Program Informasi dan Komunikasi Publik**		
	Pelatihan Start Up Wirausaha Muda	Jumlah berita tentang pelatihan start up wirausaha mudaInformasi yang disediakan	Berita	-	*7*	1.400.000	*10*	2.000.000	*10*	2.000.000	*10*	2.000.000	*10*	2.000.000	**Program Informasi dan Komunikasi Publik**	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Pengelolaan Media Komunikasi Publik*

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas.Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome),Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada tahun awal perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								2021		2022		2023		2024		2025		2026		2026			
								Tahun 0		Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (akumulasi)			
						2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
JUMLAH ANGGARAN									**11.600.317.628**		**6.721.927.350**		**7.198.737.941**		**7.126.446.482**		**7.284.242.558**		**7.385.313.866**		**35.716.668.197**		
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	**Meningkatnya Kualitas Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah**	**02.16.01**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan**	**%**	**100**	**100**	**100**	**6.212.948.328**	**100**	**5.444.753.550**	**100**	**5.918.737.941**	**100**	**5.946.446.482**	**100**	**6.100.242.558**	**100**	**6.201.313.866**	**100**	**29.611.494.397**	**Dinkominfo**	**Demak**
				Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	**%**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**			
		2,16,01.2,01.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah**	**Dokumen**	**4**	**4**	**4**	**0**	**4**	**5.000.000**	**7**	**14.000.000**	**7**	**14.000.000**	**7**	**16.000.000**	**7**	**17.500.000**	**32**	**66.500.000**		
		2,16,01.2,01.01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Jumlah dokumen perencanaan*	*Dokumen*	*4*	*0*	*0*	*0*	*4*	*5.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	4	5.000.000		
		2,16,01.2,01.02	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*Jumlah dokumen RKA*	*Dokumen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2*	*5.500.000*	*2*	*5.500.000*	*2*	*6.000.000*	*2*	*6.500.000*	8	23.500.000		

		2,16, 01.2, 01.0 5	*Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD*	*Jumlah DPA*	*Dokumen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2*	*3.000.000*	*2*	*3.000.000*	*2*	*4.000.000*	*2*	*4.500.000*	8	14.500.000		
		2,16, 01.2, 01.0 6	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Jumlah dokumen laporan kegiatan*	*Dokumen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3*	*5.500.000*	*3*	*5.500.000*	*3*	*6.000.000*	*3*	*6.500.000*	12	23.500.000		
		2,16 ,,01. 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah**	**orang**	**42**	**42**	**42**	**3.046.133.900**	**49**	**3.605.149.350**	**53**	**3.677.252.337**	**57**	**3.750.797.384**	**61**	**3.825.813.331**	**65**	**3.902.329.598**	**285**	**18.761.342.000**		
		2,16, 01.2. 02.0 1	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*orang*	*25*	*25*	25	*2.799.383.900*	30	*3.338.949.350*	32	3.405.728.337	34	*3.473.842.904*	36	*3.543.319.762*	38	*3.614.186.157*	170	20.384.619.677		
		2,06, 01.2. 02.0 2	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*- Honor Pejabat Pengguna Anggaran, PPK, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang, Pejabat Pengadaan dan Pengelola Arsip yang Terbayar* *- Tenaga Administrasi Non PNS yang terbayar*	*orang*	*17*	*17*	*17*	*246.750.000*	*19*	*266.200.000*	*21*	271.524.000	*23*	*276.954.480*	*25*	*282.493.570*	*27*	*288.143.441*	115	1.625.177.620		
		2,16 ,,01. 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**unit**	**114**	**407**	**424**	**1.140.211.033**	**184**	**1.002.000.000**	***12***	**1.002.200.000**	***12***	**1.002.200.000**	***12***	**1.003.000.000**	***12***	**1.003.500.000**	**232**	**5.012.900.000**		
		2,16, ,01.2 .08.0 1	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Jumlah tersedianya materai dan jumlah surat tercatat yang*	*keping*	*110*	*403*	*420*	*2.000.000*	*180*	*2.000.000*	*200*	2.200.000	*220*	*2.200.000*	*240*	*3.000.000*	*260*	*3.500.000*	1100	12.900.000		

				dikirim																		
		216,, 01.2. 08.0 2	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah Terbayarnya Rekening Telepon, Air, Listrik dan Internet*	*jenis*	*4*	*4*	*4*	*1.138.21 1.033*	*4*	*1.000.000. 000*	*4*	1.000.000. 000	*4*	*1.000.000. 000*	*4*	*1.000.000. 000*	*4*	*1.000.000. 000*	20	5.000.00 0.000		
		,01. 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**unit /dos /OK**	**61.9 20**	**53.9 37**	**53.9 37**	**178.595 .318**	**1.89 2**	**61.872.20 0**	**3.73 0**	**88.755.60 4**	**3.78 0**	**69.919.09 8**	**3.83 0**	**96.899.22 7**	**3.88 0**	**102.454.2 68**	**171 12**	**419.900 .397**		
		2,16, ,01.2 .06.0 1	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera gan Bangunan Kantor*	*Jumlah komponen instalasi listrik*	*unit*	*452*	*345*	*345*	*10.960.0 00*	*114*	*3.399.700*	*130*	*4.000.000*	*145*	*4.000.000*	*160*	*5.000.000*	*175*	*5.500.000*	*724*	*20.755.5 08*		
		2,16, ,01.2 .06.0 2	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*- Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor* *- Jumlah ATK*	*unit*	*90*	*3.22 7*	*3.22 7*	*49.953.6 00*	*985*	*12.498.10 0*	*1700*	*14.153.96 4*	*1700*	*14.919.09 8*	*2500*	*25.399.22 7*	*2500*	*25.454.26 8*	*8985*	*152.498. 100*		
		2,16, ,01.2 .06.0 4	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*- Jumlah makan minum rapat* *- Jumlah makan minum harian pegawai* *- Jumlah makan minum jamuan tamu*	*dos*	*1.07 5*	*2.72 5*	*2.72 5*	*39.775.0 00*	*225*	*5.100.000*	*1000*	*15.000.00 0*	*1000*	*15.000.00 0*	*1000*	*20.000.00 0*	*1000*	*20.000.00 0*	*4225*	*65.100.0 00*		
		2,16, ,01.2 .06.0 5	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Jumlah barang cetakan dan penggandaan*	*unit*	*60.2 14*	*47.5 00*	*47.5 00*	*23.252.0 00*	*428*	*5.092.400*	*450*	*5.601.640*	*475*	*6.000.000*	*500*	*6.500.000*	*500*	*6.500.000*	*2378*	*31.089.6 11*		
		,01.2 .06.0 9	*Penyelenggara an Rpat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*- Jumlah orang yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah* *- Jumlah orang yang melakukan perjalanan dinas luar daerah*	*OK*	*89*	*140*	*140*	*54.654.7 18*	*140*	*35.782.00 0*	*130*	*50.000.00 0*	*70*	*30.000.00 0*	*180*	*40.000.00 0*	*200*	*45.000.00 0*	*720*	*200.782. 000*		

		,01.2,07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah**	**unit**	**47**	**49**	**49**	**465.045.757**	**0**	**0**	**13**	**150.000.000**	**13**	**123.000.000**	**14**	**148.000.000**	**14**	**150.000.000**	**54**	**571.000.000**		
		,01.2,07,02	*Pengadaan Kendaraan Dinas*	*Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2*	Unit	0	0	0	0	0	0	2	50.000.000	1	25.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	7	175.000.000		
		,01.2,07.05	*Pengadaan Mebel*	*- Jumlah pengadaan mebel*	unit	0	38	38	64.995.000	0	0	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	20	100.000.000		
		,01.2,07.06	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*- Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya*	unit	45	9	9	400.050.757	0	0	5	25.000.000	6	25.000.000	6	25.000.000	6	25.000.000	23	100.000.000		
		,01.2,07.11	*Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya*	*- Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya*	unit	2	2	2	0	0	0	1	50.000.000	1	48.000.000	1	48.000.000	1	50.000.000	4	196.000.000		
		2,16,,01.2,09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintahan daerah**	**unit**	**15**	**15**	**16**	**527.604.320**	**15**	**100.202.000**	**15**	**103.000.000**	**15**	**103.000.000**	**15**	**115.000.000**	**15**	**120.000.000**	**75**	**541.202.000**		
		2,06,01.2,09.02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan*	*- Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang terpelihara* *- Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang terpelihara*	*unit*	*13*	*13*	*13*	*130.682.920*	*13*	*83.654.100*	*13*	85.000.000	*13*	*85.000.000*	*13*	*95.000.000*	*13*	*100.000.000*	13	448.654.100		

		2,06,01.2,09.11	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau BangunanLainnya*	*- Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Terpelihara* *- Jumlah bagunan yang direhabilitasi*	*unit*	*2*	*2*	*2*	*396.921.400*	*2*	*16.547.900*	*2*	18.000.000	*2*	*18.000.000*	*2*	*20.000.000*	*2*	*20.000.000*	2	92.547.900		
		2,16,01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Orang/buah/keg**	**85**	**121**	**121**	**855.358.000**	*12*	**670.530.000**	*285*	**883.530.000**	*315*	**883.530.000**	*315*	**895.530.000**	*315*	**905.530.000**	1242	**4.238.650.000**		
		2,16,01.2.05.02	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	*- Jumlah pakaian Lurik* *- Jumlah pakaian batik* *- Jumlah pakaian Olahraga* *- Jumlah atribut pakaian dinas*	*buah*	*40*	*60*	*60*	*23.628.000*	*0*	*0*	*70*	63.000.000	*70*	*63.000.000*	*280*	*70.000.000*	*280*	*70.000.000*	700	266.000.000		
		2,16,01.2.05.09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	*Jumlah pegawai yang mengikuti diklat*	*orang*	*45*	*60*	*60*	*161.200.000*	*0*	*0*	*70*	150.000.000	*70*	*150.000.000*	*70*	*155.000.000*	*70*	*165.000.000*	280	620.000.000		
		2,16,,01.2.05.10	*Sosialisasi peraturan Perundang-undang*	*Jumlah Kegiatan*	*kegiatan*	*0*	*1*	*1*	*670.530.000*	*5*	*670.530.000*	*5*	*670.530.000*	*5*	*670.530.000*	*5*	*670.530.000*	*5*	*670.530.000*	25	4.093.652.703		

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT	**Meningkatnya layanan informasi publik**	**,2.16.03**	**Program Aplikasi Informatika**	**Persentase Aplikasi e-gov yang terintegrasi dengan portal daerah**	**%**	**50**	**52**	**53**	**3.640.070.000**	**54,76**	**509.258.000**	**59,52**	**523.000.000**	**64,28**	**523.000.000**	**69,04**	**527.000.000**	**73,80**	**527.000.000**	**73,80**	**2.609.258.000**		
		,2.16.03.2.02	**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah aplikasi yang telah terintegrasi**	**Unit**	**7**	**7**	**2**	**2.845.110.000**	**2**	**331.973.000**	**2**	**343.000.000**	**2**	**343.000.000**	**2**	**343.000.000**	**2**	**343.000.000**	**5**	**1.703.973.000**		
		,2.16.03.2.02.2	*Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik*	*Terlaksanaya Program Smart City (Nilai Indeks SPBE)*	*Indeks*		*3,74*	*3.00*	*288.025.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
		,2.16.03.2.02.8	*Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah*	*Monitoring menara dan monitoring warnet dan jasa pos lainnya terlaksana*	*%*		*196*	*196*	*32.880.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
		,2.16.03.2.02.10	*Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah*	*Jumlah perangkat daerah yang telah menerapan implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi*	*OPD*	*42*	*41*	*41*	*1.959.209.000*	*41*	*82.467.000*	*41*	*83.000.000*	*41*	*83.000.000*	*41*	*83.000.000*	*41*	*83.000.000*	*41*	*414.467.000*		
		,2.16.03.2.02.12	*Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE*	*Jumlah kegiatan monev yang dilaksanakan*	*kegiatan*	*4*	*1*	*0*	*0*	*1*	*30.363.000*	*1*	*32.000.000*	*1*	*32.000.000*	*1*	*32.000.000*	*1*	*32.000.000*	*5*	*158.363.000*		
		,2.16.03.2.02.11	*Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)*	*Jumlah pegawai yang mengikuti diklat*	*pegawai*	*30*	*4*	*4*	*28.580.000*	*120*	*40.378.000*	*120*	*43.000.000*	*120*	*43.000.000*	*120*	*43.000.000*	*120*	*43.000.000*	*600*	*212.378.000*		

		,2.16.03.2,02..07	*Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik*	*Jumlah Aplikasi yang dikembangkan*	*OPD*	*10*	*15*	*15*	*488.177.000*	*20*	*137.384.000*	*25*	*140.000.000*	*30*	*140.000.000*	*35*	*140.000.000*	*41*	*140.000.000*	*41*	*697.384.000*		
		,2.16.03.2.02.09	*Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas*	*Jumlah dokumen evaluasi masterplan smart city*	*Dokumen*	*1*	*1*	*1*	*48.239.000*	*1*	*41.381.000*	*1*	*45.000.000*	*1*	*45.000.000*	*1*	*45.000.000*	*1*	*45.000.000*	*5*	*221.381.000*		
		,2.16.03.2.01	**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah**	**OPD**	**42**	**41**	**41**	**794.960.000**	**41**	**177.285.000**	**41**	**180.000.000**	**41**	**180.000.000**	**41**	**184.000.000**	**41**	**184.000.000**	**41**	2.007.342.654		
		,2.16.03.2.01.03	*Penyelenggaraan Sistem Jaringan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah*	*Jumlah penambahan Fiber Optik (FO)*	*Km*	***7***	***2***	***2***	*794.960.000*	*2*	*177.285.000*	*2*	180.000.000	*2*	*180.000.000*	*2*	*184.000.000*	*2*	*184.000.000*	*10*	2.007.342.654		
		,2.16.02	**Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**	**Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Tingkat Jawa Tengah**	**Nilai**	**98,58**	**98,60**	**98,60**	**1.639.075.200**	**98,70**	**675.000.000**	**98,80**	**572.000.000**	**98,90**	**472.000.000**	**99,00**	**472.000.000**	**99,10**	**472.000.000**	**99,10**	**3.041.064.800**		
		,2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Layanan Komunikasi dan Informasi publik yang dikelola**	**Layanan**	**4**	**5**	**5**	**1.639.075.200**	**5**	**675.000.000**	**5**	**572.000.000**	**5**	**472.000.000**	**5**	**472.000.000**	**5**	**472.000.000**	**5**	**3.041.064.800**		
		,2.16.02.2.01.11	*Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah*	*Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)*	*KIM*	*30*	*2*	*0*	*0*	*2*	*21.600.000*	*2*	*22.000.000*	*2*	*22.000.000*	*2*	*22.000.000*	*2*	*22.000.000*	*10*	*131.870.160*		

		,2.16.02.2.01.12	*Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas*	*Jumlah Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas*	*kegiatan*	*3*	*3*	*3*	*1.455.235.200*	*3*	*176.400.000*	*3*	*150.000.000*	*3*	*150.000.000*	*4*	*150.000.000*	*4*	*150.000.000*	*10*	*1.076.939.640*		
		,2.16.02.2.01.06	*Pelayanan Informasi Publik*	*Jumlah Berita*	*Berita*	*604*	*720*	*0*	*183.840.000*	*720*	*50.000.000*	*720*	*50.000.000*	*960*	*50.000.000*	*960*	*50.000.000*	*960*	*50.000.000*	*4320*	*305.255.000*		
		,2.16.02.2.01.05	*Pengelolaan Media Komunikasi Publik*	*Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan melalui Media*	*Layanan*	*16*	*16*	*0*	*0*	*16*	*427.000.000*	*16*	*350.000.000*	*16*	*250.000.000*	*16*	*250.000.000*	*16*	*250.000.000*	*16*	*1.527.000.000*		
		,2.21.02	**Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi**	**Tingkat keamanan informasi pemerintah**	**%**	**25**	**35**	**50**	**70.068.600**	**62,5**	**39.700.000**	**62,5**	**65.000.000**	**75**	**65.000.000**	**87,5**	**65.000.000**	**92**	**65.000.000**	**92**	**299.700.000**		
		,2.21.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah layanan elektronik yang di integrasikan dengan Tanda Tangan Elektronik**	**Unit layanan**	**7**	**1**	**1**	**70.068.600**	**1**	**39.700.000**	**1**	**65.000.000**	**1**	**65.000.000**	**1**	**65.000.000**	**1**	**65.000.000**	**5**	**299.700.000**		
		,2.21.02.2.01.02	*Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	*Kegiatan Bimtek pembinaan pengelolaan persandian*	*kegiatan*	*-*	*1*	*1*	*23.470.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
		,2.21.02.2.01.03	*Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik*	*Jumlah Sistem Informasi yang telah di enkripsi dengan sertifikat SSL*	*sistem*	*30*	*3*	*0*	*0*	*3*	*32.955.000*	*3*	*40.000.000*	*3*	*40.000.000*	*3*	*40.000.000*	*3*	*40.000.000*	*15*	*192.955.000*		

		,2.21.02.2.01.04	*Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah sistem elektronik/aset informasi yang telah di asessment*	*Unit layanan*	*2*	*2*	*2*	*46.598.600*	*2*	*6.745.000*	*2*	*25.000.000*	*2*	*25.000.000*	*2*	*25.000.000*	*2*	*25.000.000*	*10*	*106.745.000*		
		,2.20.02	**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	**Tingkat Ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi**	**%**	**0**	**0**	**100**	**38.155.500**	**100**	**53.215.800**	**100**	**120.000.000**	**100**	**120.000.000**	**100**	**120.000.000**	**100**	**120.000.000**	**100**	**533.215.800**		
		,2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah**	**Jumlah data dalam Satu Data yang memiliki metadata**	**metadata**	*8000*	*10000*	*10000*	**38.155.500**	*12000*	**53.215.800**	***15000***	**120.000.000**	***17000***	**120.000.000**	***20000***	**120.000.000**	***23000***	**120.000.000**	***23000***	**533.215.800**		
		,2.20.02.2.01.01	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral*	*Jumlah ketersediaan data statistik sektoral*	*Data statistik/BUKU*	*0*	*0*	*1*	*20.381.000*	*1*	*15.280.500*	*1*	30.000.000	*1*	*30.000.000*	*1*	*30.000.000*	*1*	*30.000.000*	*4*	135.280.500		
		,2.20.02.2.01.02	*Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi*	*Jumlah Kegiatan/ sosialisasi/bintek*	*kegiatan*	*1*	*0*	*0*	*0*	*1*	*13.500.000*	*1*	30.000.000	*1*	*30.000.000*	*1*	*30.000.000*	*1*	*30.000.000*	*5*	133.500.000		
		,2.20.02.2.01.04	*Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral*	*Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah*	*OPD*	*42*	*0*	*0*	*0*	*41*	*6.125.800*	*41*	30.000.000	*41*	*30.000.000*	*41*	*30.000.000*	*41*	*30.000.000*	*41*	126.125.800		
		,2.20.02.2.01.03	*Membangun Metadata Statistik Sektoral*	*Jumlah kelengkapan metadata statistik sektoral*	*metadata*	*25*	*400*	*500*	*17.774.500*	*600*	*18.309.500*	*700*	30.000.000	*800*	*30.000.000*	*900*	*30.000.000*	*1000*	*30.000.000*	*1000*	138.309.500		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor layanan publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor layanan publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output, outcome* dan tujuan utama *entitas. Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak yang Mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Demak

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Indikator				Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target					Kondisi Akhir
		IKU	SPM	IKK	SDGs			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	V	-	-	-	Angka	90,09	90,10	90,11	90,12	90,13	90,14	90,14
2	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	V	-	-	-	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	V	-	-	-	Angka	82,04	82,54	83,04	83,54	84,04	84,54	84,54
4	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	V	-	-	-	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Indeks SPBE	V	-	-	-	Angka	3,74	2,942	2,943	2,944	2,945	3,000	3,00
6	Indeks Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	V	-	-	-	Angka	3,94	2,84	2,86	2,88	2,90	2,93	2,93
7	Indeks Keamanan Informasi	V	-	-	-	Angka	n/a	1,70	2,20	2,50	2,70	3,00	3,00
8	Indeks tata kelola SPBE	V	-	-	-	Angka	3,57	2,95	2,96	2,97	2,98	3,00	3,00
11	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	-	-	V	-	%	25,63	50	62,5	75	87,5	100	100
12	Cakupan Layanan Telekomunikasi	-	-	V	-	%	88,22	92,00	94,00	96,00	98,00	100	100
13	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	-	-	-	V	%	68,7	72’90	74’36	75’85	77,37	78’91	78,91
14	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	-	-	V	-	%	81	82	83	84	85	86	86
15	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	-	-	V	-	%	70,61	72	74	76	78	80	80
16	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	-	-	V	-	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
17	Buku ”kabupaten dalam angka”	-	-	V	-	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Indikator				Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target					Kondisi Akhir
		IKU	SPM	IKK	SDGs			2022	2023	2024	2025	2026	
18	Buku ”PDRB”	-	-	V	-	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
19	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	-	-	V	-	%	100	100	100	100	100	100	100
20	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	-	-	V	-	%	100	100	100	100	100	100	100
21	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	-	-	V	-	%	62,5	75,00	81,25	87,50	93,75	100	100
22	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	-	-	V	-	%	88,797	92,38	94,23	96,12	98,04	100	100
23	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	-	-	V	-	%	100	100	100	100	100	100	100
24	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	-	-	V	-	%	100	100	100	100	100	100	100
25	Tingkat keamanan informasi pemerintah	-	-	V	-	%	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kabupaten Demak untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan Statistik dan urusan Persandian dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak 2021-2026. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak.

Permasalahan Bidang urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Statistik dan urusan Persandian sangatlah komplek dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistim pengelolaan bidang Komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian yang infortmatif terintegrasi,

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit

kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan Bidang urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Statistik dan urusan Persandian secara optimal dan terpadu.

Semoga Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak Tahun 2021 - 2026 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Kabupaten Demak.